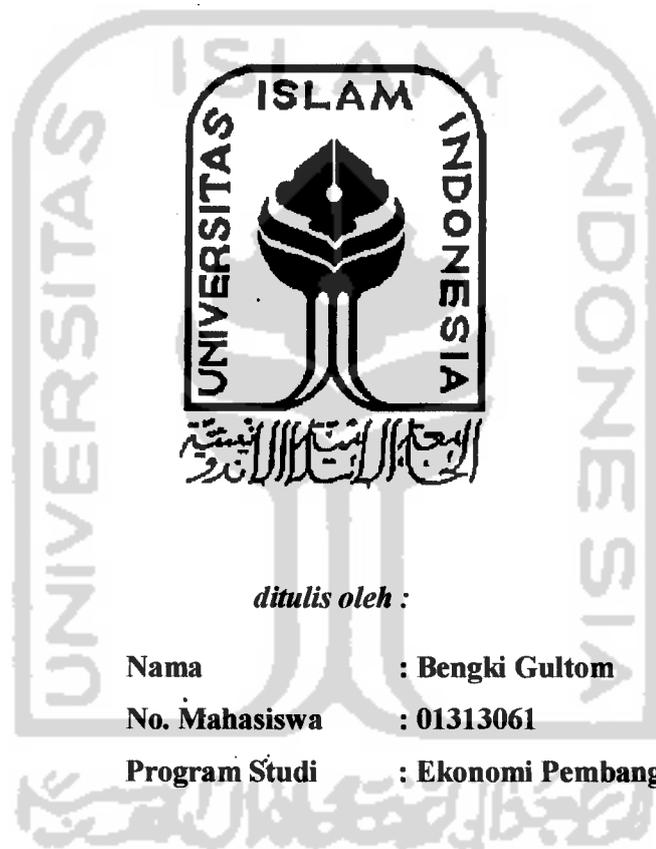


**ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK DAERAH TERHADAP PDRB RIIL
DI INDONESIA PERIODE 1998-2003**

SKRIPSI



ditulis oleh :

Nama : Bengki Gultom

No. Mahasiswa : 01313061

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

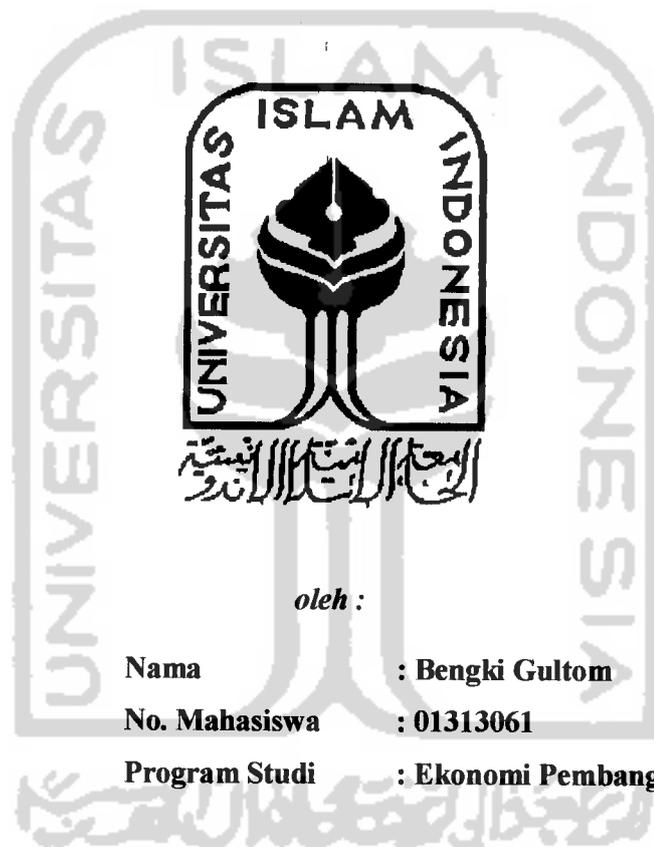
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK DAERAH TERHADAP PDRB RIIL

DI INDONESIA PERIODE 1998-2003

SKRIPSI

ditulis dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna
memperoleh gelar Sarjana Strata-1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia



**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
YOGYAKARTA
2006**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 17 Januari 2006

Penulis,

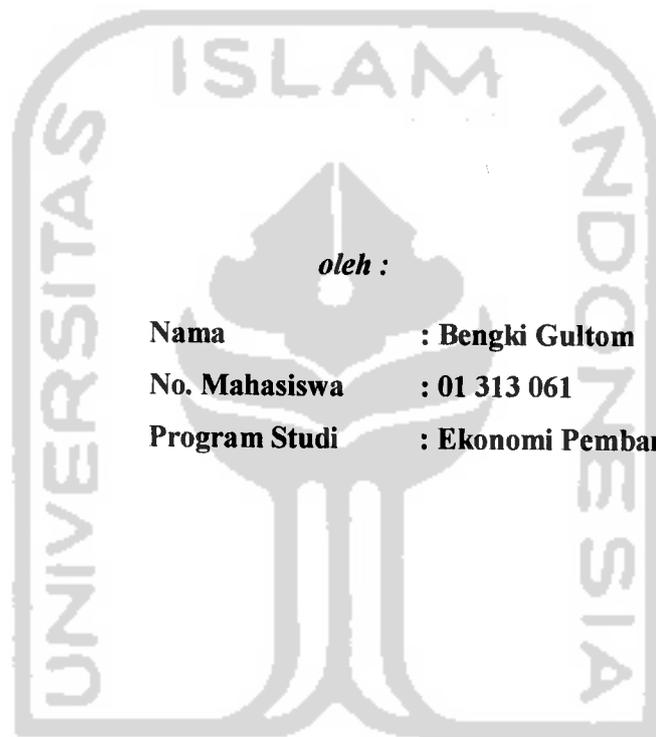
Bengki Gultom

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK DAERAH TERHADAP PDRB RIIL

DI INDONESIA PERIODE 1998-2003



oleh :

Nama : Bengki Gultom

No. Mahasiswa : 01 313 061

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, 17 Januari 2006

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Diana Wijayanti', is written over the printed name of the supervisor.

(Diana Wijayanti, Dra,M.Si.)

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK TERHADAP PDRB RIL DI INDONESIA
PERIODE 1998 - 2003**

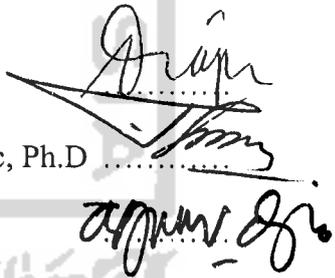
**Disusun Oleh: BENGKI GULTOM
Nomor mahasiswa: 01313061**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**
Pada tanggal : 15 Februari 2006

Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Diana Wijayanti, M.Si

Penguji I : Drs. Munrokhim M.,MA.Ec, Ph.D

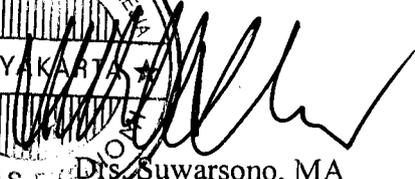
Penguji II : Drs. Agus Widarjono, MA



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwarsono, MA



ABSTRAKSI

Peran pemerintah didalam perekonomian merupakan hal yang sangat penting didalam menciptakan perekonomian yang baik. Melalui kebijakan-kebijakan yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mendukung perekonomian suatu negara dengan memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, keamanan, kesehatan, transportasi, perumahan, infrastruktur, dan lainnya. Kebijakan sektor publik terkait dengan peran pemerintah didalam taxing dan spending dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan diberlakukannya otonomi daerah, kemandirian daerah seharusnya dapat mendorong pemerintah daerah untuk dapat lebih berwenang dalam mengelola keuangan daerah dan tentunya mempunyai dampak yang lebih baik terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Dalam melihat tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan suatu indikator yang menjadi ukuran pembangunan negara dalam mencapai tingkat perekonomian yang lebih matang dan merata. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, dapat dikatakan negara tersebut mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam penelitian ini akan mengukur sejauh mana pengaruh kebijakan sektor publik terhadap PDRB riil di Indonesia, dengan menggunakan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah investasi, dan Pengeluaran Pemerintah daerah. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel jumlah tenaga kerja, investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah mempunyai pengaruh dan positif terhadap PDRB riil di Indonesia.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT yang memberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : “Analisis Peranan Sektor Publik Daerah Terhadap PDRB Riil Di Indonesia Periode 1998-2003”, yang ditujukan untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UII.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs. H. Suwarsono, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Ibu Diana Wijayanti, Dra. M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberi pengarahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi ini
3. Seluruh Dosen yang ada di Fakultas Ekonomi UII. (terima kasih buat motivasi dan bimbingan serta ilmu yang diberikan selama penulis kuliah

di FE UII) dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

4. Seluruh keluarga besar Richson Gultom: Bapak sebagai dan Ibu tercinta yang selalu berikan doa dan tak pernah lelah tuk beri dukungan moril maupun materil dalam segala hal. Opung, Nenek, Mamak, Acik and seluruh keluarga yang merupakan inspirasi dan sumber kekuatan terbesar yang menuntunku
5. Saudara sekandungku; Beri, Fitri, Doni, Medi, Roni Tua (sekali Gultom tetap Gultom, jadilah sesuatu yang berarti bagi orang lain, jadilah bermanfaat....Bravo!!!)
6. Teman-teman Nebula Band, (thank guys, for the best years in soul of music, senang bisa memahami hidup bersama kalian, keep Rockin')
7. Sahabat-sahabat terbaik yang pernah ada baik yang masih hidup ato yang udah duluan (semoga Rahmat Allah menyertaimu), ocu Eno (makasih komputernya ya cu), Lutfi, Dadank, Jadun, Thomas, Kubil, Ucup, Rudi, Sifa, semuanya dech (kalian semua Gila) maaf yang namanya ga tertulis. (makasih nasehat-nasehatnya and waktu suka-duka, curhatnya meriah euy...!??).
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam proses menerapkan ilmu yang penulis dapatkan di bangku kuliah, paling tidak skripsi ini diharapkan mampu membantu kemajuan ilmu

pengetahuan. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk lebih menyempurnakan skripsi ini dimasa mendatang penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak dengan harapan agar dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan.

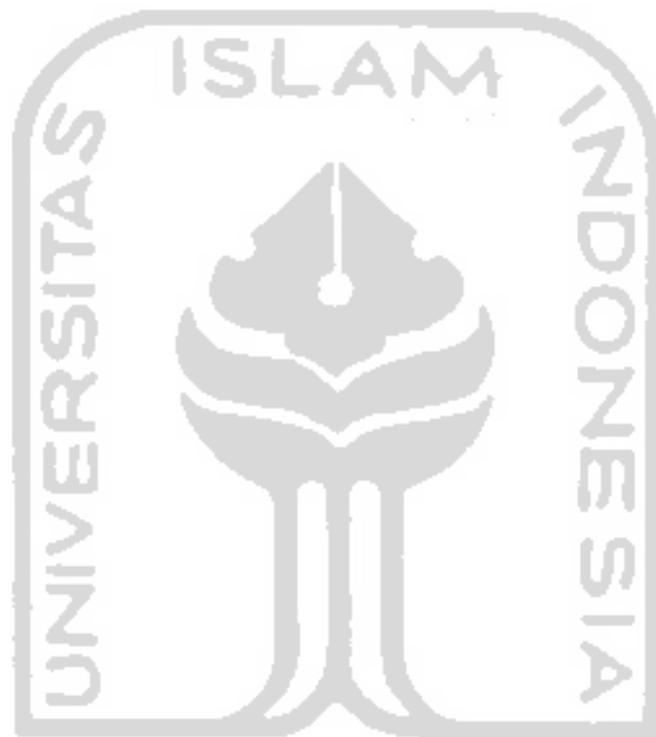
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 20 Februari 2006
Penulis

(Bengki Gultom)

HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan skripsi ini khusus untuk:

*↳ Bapak dan Ibu tercinta yang selalu mengiringi
setiap langkahku dengan do'a.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL DEPAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR GRAFIK	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11

BAB II. GAMBARAN UMUM	13
2.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.2. Perkembangan Angkatan Kerja.....	19
2.3. Perkembangan Investasi.....	23
2.4. Perkembangan Pengeluaran Daerah.....	27
BAB III. TELAAH PUSTAKA	31
3.1. Penelitian Sung Tai Kim.....	31
3.2. Penelitian Prabowo Sutanto.....	33
BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS	35
4.1. Tinjauan Tentang Pertumbuhan Ekonomi.....	35
4.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	35
4.1.2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi.....	38
4.1.3. Metode Perhitungan GDP/PDRB.....	39
4.2. Teori Tentang Angkatan Kerja.....	41
4.3. Teori Tentang Investasi.....	42
4.4. Teori Pengeluaran Pemerintah.....	44
4.4.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	46
4.4.2. Hukum Wagner.....	47
4.4.3. The Displacement Effect.....	49
4.5. Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan daerah.....	50
4.5.1. Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah.....	50

4.6. Hipotesa	52
BAB V. METODE PENELITIAN.....	54
5.1. Jenis data.....	54
5.2. Metode Analisis data	54
5.3. Pemilihan Model Estimasi	56
a. Uji Signifikansi Fixed Effect	56
b. Uji Signifikansi Random Effect.....	58
c. Uji Hausman	58
5.4. Kriteria Statistik.....	59
a. Pengujian Parsial (Uji-t).....	59
b. Pengujian Secara Serempak (Uji-F).....	61
c. Pengujian Ketetapan Perkiraan (Uji R Squares)	62
BAB VI. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	63
6.1. Pengujian Pemilihan Model Estimasi Regresi	
Data Panel.....	64
6.1.1. Uji Signifikansi Fixed Effect.....	65
6.1.2. Uji Signifikansi Random Effect	67
6.1.3. Uji Hausman	67
6.2. Kriteria Statistik.....	68
6.1.1. UjiF Statistik.....	68
6.1.2. Koefisien Determinasi (R Squares).....	69
6.1.3. Pengujian secara Parsial (Uji t)	69

6.2.1. Pengujian Terhadap Angkatan Kerja.....	70
6.2.2. Pengujian Terhadap Investasi.....	72
6.2.3. Pengujian Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah	73
6.3. Interpretasi Masing-masing Variabel Independen	75
6.3.1. Analisis Pengaruh Angkatan Kerja Terhadap PDRB Riil.....	75
6.3.2. Analisis Pengaruh Investasi Terhadap PDRB Riil	76
6.3.3. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap PDRB Riil	77
BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Implikasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	84



DAFTAR TABEL

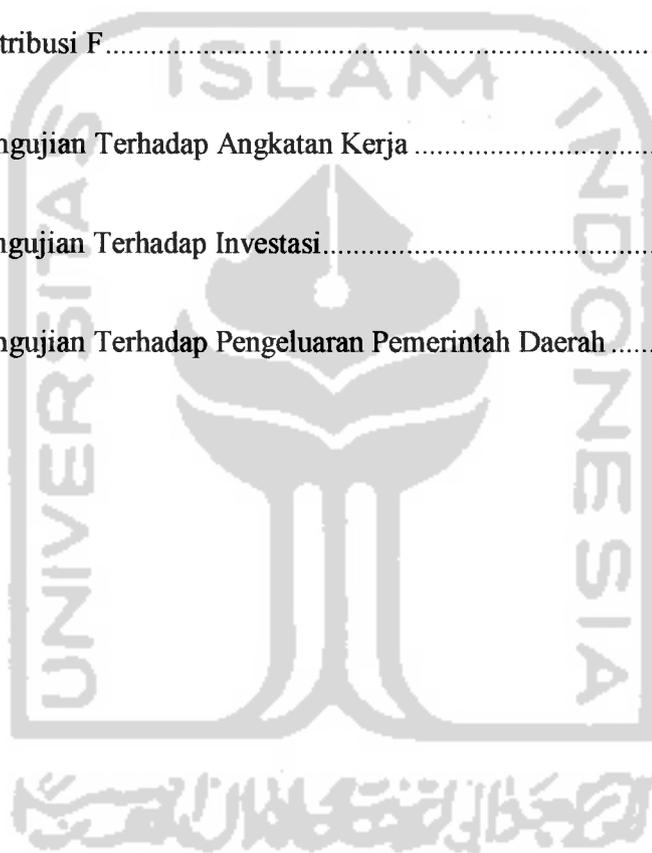
Tabel	Halaman
1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia 2001-2003	4
1.2. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1998- 2003 Menurut Harga Konstan	8
2.2. PDRB Indonesia Menurut Lapangan Usaha Periode 1998-2003	15
2.3. PDRB Atas dasar Harga Konstan 1993 Menurut Provinsi	17
2.4. Perkembangan Angkatan Kerja Usia 10 tahun Keatas Menurut Provinsi	20
2.5. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Menurut Provinsi Tahun 2002- 2003	21
2.6. Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Yang telah Disetujui Oleh Pemerintah Menurut sektor Ekonomi	24
2.7. Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri yang Telah Distujui Oleh Pemerintah menurut Provinsi	26
2.8. Anggaran Belanja Indonesia Periode 2000-2003	27
2.9. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Diberbagai Provinsi	29
6.1. Hasil Regresi Metode OLS	65

6.2. Hasil Regresi Metode Fixed Efecct.....	66
6.3. Hasil Uji F.....	68
6.4. Hasil Uji t.....	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.3. Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.....	50
5.1. Kurva Distribusi t.....	60
5.2. Kurva Distribusi F.....	62
6.1. Kurva Pengujian Terhadap Angkatan Kerja.....	71
6.2. Kurva pengujian Terhadap Investasi.....	73
6.3. Kurva Pengujian Terhadap Pengeluaran Pemerintah Daerah.....	74



DAFTAR GRAFIK

4.1. Pengeluaran Pemerintah Pada Keynesian Cross	45
4.2. Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner	48



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Adanya peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara merupakan suatu yang tidak diperdebatkan dalam teori-teori maupun khazanah pemikiran ekonomi. Melalui berbagai kebijakan ekonomi yang terkait dengan sektor publik, pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Post, James dkk, 1996, 209-210).

Secara sederhana kebijakan ekonomi dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam mempengaruhi jalannya perekonomian agar mampu mencapai keadaan perekonomian yang diinginkan. Ketika perekonomian semakin kompleks maka pemerintah diperlukan dalam usaha mencapai kondisi *full employment* seperti yang diuraikan oleh J.M. Keynes dalam bukunya "*general theory of employment, interest and money*". Dalam konteks makro permasalahan ekonomi adalah berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan defisit neraca pembayaran. Sehubungan dengan masalah ini pemerintah memiliki seperangkat kebijakan untuk mencapai sasaran ekonomi yang diinginkan dengan memberikan berbagai kebijakan misalnya kebijakan moneter, fiskal, kebijakan ekonomi internasional, serta kebijakan sektor publik.

Besar atau kecilnya peran pemerintah didalam perekonomian, lahir dalam beberapa pendapat dan argumentasi, Dari pendapat yang menyatakan

bahwa peran pemerintah dalam perekonomian adalah penting, sampai ke pendapat yang menyatakan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi dan lebih mendorong ekonomi pada sektor swasta atau pasar.

Pentingnya intervensi pemerintah dalam perekonomian disebabkan oleh adanya beberapa alasan, antara lain kebutuhan akan penyediaan infrastruktur, adanya kegagalan pasar atau *market failure*, adanya eksternalitas ekonomis, penyediaan barang publik, informasi yang tidak sempurna, distribusi pendapatan, menghilangkan kemiskinan, penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, perumahan, melindungi hak-hak generasi mendatang, dan peran penting lainnya yang sangat menonjol dalam perekonomian negara. Pada dasarnya peran pemerintah dalam suatu negara mempunyai beberapa fungsi pokok sebagai berikut :

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi
2. Peran distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar
3. Peran stabilisatif, yakni peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan tidak seimbang
4. Peran dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju

Akan tetapi, peran pemerintah yang terlalu tinggi ternyata tidak selalu mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu dikurangi. campur tangan yang berlebihan, pada banyak negara berkembang, justru banyak menimbulkan masalah perekonomian. Dengan demikian, besar-kecilnya peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun daerah, sangat tergantung pada efisiensi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengelola perekonomian daerah tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam sektor publik berhubungan dengan fungsi pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Pelayanan dalam bidang sosial meliputi kebutuhan masyarakat akan keamanan, pertahanan nasional, kepolisian, pemadam kebakaran, pendidikan, pembangunan jalan dan transportasi, bendungan, listrik, kesehatan, perumahan dan proyek-proyek penting yang berhubungan dengan kepentingan publik. Sedangkan kebijakan publik dibidang ekonomi berkaitan dengan perpajakan, eksport-import, peran pemerintah dalam memengaruhi permintaan dan penawaran barang, nilai uang negara tersebut, stabilitas perekonomian, nilai tabungan, tingkat bunga, investor, pinjaman ke luar negeri, dan kebijakan lain. Dalam konteks ekonomi publik, kebijakan-kebijakan tersebut tercermin dalam pendapatan dan pengalokasian sumber daya dalam bentuk pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

TABEL 1.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Periode 2001-2003
(Trilyun Rupiah)

Rincian	Tahun		
	2001	2002	2003
1. Pendapatan Negara dan Hibah	152,9	286,0	336,16
1. Penerimaan dalam Negeri	152,9	286,0	336,16
a. penerimaan Pajak	101,4	185,3	254,14
b. Penerimaan bukan pajak	100,8	73,2	82,02
2. hibah	0,0	0,0	0,3
2. Belanja Negara	340,3	332,5	374,8
1. Belanja pemerintah pusat	258,9	742,1	254,1
a. pengeluaran rutin	213,4	195,1	189,1
- belanja pegawai	38,3	41,1	47,3
- Belanja barang	9,9	12,0	13,9
- Pembiayaan bunga utang	89,6	87,1	69,2
- Subsidi	66,3	46,2	43,9
- Pengeluaran rutin lainnya	9,4	9,5	14,8
b. pengeluaran Pembangunan	45,5	47,1	65,0
II. Dana Perimbangan	81,5	90,3	120,7

Sumber Data : Departemen Keuangan

APBN tahun 2003 masih seperti tahun sebelumnya dimana penerimaan pemerintah masih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak, yaitu sebesar 75,60 persen dari seluruh pendapatan negara bersumber dari pajak tersebut. Anggaran belanja pemerintah yang sebesar 374,8 trilyun rupiah melebihi pendapatan Negara yang besarnya 336,16 trilyun rupiah. Hal ini menyebabkan defisit anggaran sebesar 39,7 trilyun rupiah. Kekurangan anggaran oleh pemerintah pembiayaannya diusahakan dari sumber penerimaan lain yang berasal dari dalam dan luar negeri, masing-masing 22.450 milyar rupiah dan 11.986 milyar rupiah.

Pada tahun 2002, realisasi penerimaan tercatat sebesar 299,9 trilyun rupiah, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar 211,0 trilyun rupiah dan penerimaan bukan pajak sebesar 88,9 trilyun rupiah. Sumbangan terbesar dari perpajakan yaitu pajak penghasilan yaitu sebesar 101,7 trilyun rupiah atau sebesar 33,91 persen dari total penerimaan.

Tahun 2003, realisasi penerimaan tercatat sebesar 342,5 trilyun rupiah, yang terdiri dari penerimaan atas pajak sebesar 248,5 trilyun rupiah dan penerimaan bukan pajak sebesar 94,0 trilyun. Sumbangan terbesar dari penerimaan pajak adalah pajak penghasilan, yaitu sebesar 122,4 trilyun rupiah, atau sebesar 35,71 persen dari total penerimaan.

Pada tahun 2002, alokasi belanja terbesar masih tetap untuk pengeluaran rutin pemerintah pusat yang mencapai 57,7 persen dari total belanja belanja Negara, diikuti oleh belanja untuk daerah sebesar 30 persen, dan pengeluaran pembangunan sebesar 12,3 persen. Sebagian besar dari anggaran digunakan untuk pembayaran bunga utang sebesar 27,4 persen, diikuti oleh Dana Alokasi Umum sebesar 21,1 persen, dan subsidi sebesar 12,2 persen dari total belanja Negara.

Pada tahun 2003 alokasi belanja daerah dan pembangunan meningkat masing-masing menjadi sebesar 32,2 persen dan 17,3 persen dari total belanja negara, sementara alokasi untuk belanja rutin turun menjadi sebesar 50,5 persen dari total belanja.

Pendapatan pemerintah merupakan jumlah penerimaan dari sektor pajak dan non-pajak. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak mencakup penerimaan

dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, baik itu dari sektor migas ataupun non-migas. Sedangkan penerimaan pemerintah dari sisi non-pajak mencakupi penerimaan dari utang luar negeri, hibah, penerimaan departemen/lembaga pemerintah non-departemen dan bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara.

Pengeluaran pemerintah secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berisikan pembiayaan roda pemerintahan sehari-hari, meliputi belanja barang, belanja pegawai, berbagai macam subsidi, bantuan sosial, dan tabungan pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembangunan maksudnya pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial, layanan ekonomi, pembangunan jalan, dan lainnya.

Sejalan dengan perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yang merupakan titik awal pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diharapkan dengan otonomi daerah akan menghasilkan manfaat yang nyata dan mendorong, meningkatkan kreatifitas masyarakat dalam membangun serta pemerataan hasil pembangunan. Disamping itu juga memperbaiki alokasi sumber daya yang produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan ketingkat

pemerintah yang lebih rendah Kabupaten/Kota, kecuali dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, luar negeri, moneter, agama. (Mubyarto, 2001 hal :83)

Dengan adanya otonomi daerah, pembangunan di Indonesia ini akan lebih merata, dan akan memberikan peluang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel dan demokratis dalam pembangunan daerah. Pemerintah di daerah mempunyai wewenang untuk mengelola daerahnya secara mandiri tanpa harus menunggu perintah atau keputusan dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah di daerah juga lebih demokratis, karena memberikan peluang untuk menentukan kebijakan-kebijakan secara mandiri, sehingga pemerintah pusat berperan sebagai fungsi kontrol dari tiap-tiap daerah. Hal ini sesuai dengan UU No 5 Tahun 1974 tentang Desentralisasi yang artinya ialah kebijakan dan kewenangan sepenuhnya ada pada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Daerah dikembangkan menjadi daerah dengan konsentrasi pada sektor pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata. Perekonomian daerah ini tumbuh karena pengembangannya dilakukan secara terpadu oleh pemerintah dan swasta. Dengan otonomi yang dimiliki daerah ini maka setiap keputusan/kebijaksanaan dalam menangkap peluang pengembangan dapat segera dihasilkan tanpa melalui proses birokrasi yang panjang. Kondisi inilah yang diharapkan menjadi keunggulan Daerah dalam mencapai pembangunan ekonomi yang baik.

Suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah bias diukur melalui kinerja perekonomian sebuah negara yang dilihat dari indikator ekonomi secara makro, seperti pertumbuhan ekonomi. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 1998-2003 dapat dilihat sebagai berikut :

TABEL 1.2.
Perkembangan PDRB Riil Indonesia Periode 1998-2003 Menurut Harga Konstan 1993 (Dalam Persen)

Tahun	PDRB (milyar rupiah)	Pertumbuhan ekonomi
1998	376.374,9	-13,12
1999	379.557,7	0,84
2000	397.666,3	4,78
2001	411.753,5	3,32
2002	426.942,9	3,66
2003	444.453,5	4,10

Sumber : Laporan tahunan BI, berbagai edisi (diolah)

Pada tahun 2000, perekonomian Indonesia menunjukkan usaha pemulihan yang lebih baik. Pemulihan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar 4,78% lebih tinggi dari perkiraan awal tahunan bank Indonesia sebesar 3,00%-4,00%. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,32% dan tahun 2002 naik tipis menjadi 3,66%. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 4,10 %.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2003 semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 1993, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,10 persen. Nilai PDRB tanpa migas adalah 444,5 trilyun rupiah sementara tanpa migas menjadi 412,7 trilyun rupiah dari 394,5 trilyun rupiah pada tahun 2002.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Setiap propinsi juga tidak terlepas dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih baik, lebih mandiri, dan lebih mencerminkan pembangunan daerah yang optimal. Oleh karena itu sistem kemandirian daerah tersebut tidak lepas dari peranan pemerintah daerah dalam mengelola perekonomian daerahnya. Kebijakan-kebijakan yang diambil hendaknya mengutamakan kepentingan masyarakat. Dalam hubungannya dengan kebijakan yang diambil pemerintah daerah, tentunya tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah yang didukung oleh peran sektor publik yang mencakup penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS PERANAN SEKTOR PUBLIK DAERAH TERHADAP PDRB RIIL DI INDONESIA PERIODE 1998-2003 "**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel jumlah tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh variabel jumlah investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah angkatan kerja, jumlah investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh variabel jumlah tenaga kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh variabel jumlah investasi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia

4. Mengetahui pengaruh jumlah angkatan kerja, jumlah investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah sebagai penentu kebijakan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pertumbuhan ekonomi daerah
2. Sebagai informasi dan masukan bagi peneliti lain yang berminat pada permasalahan yang sama
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang deskripsi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

Berisi uraian atau gambaran umum atas subyek penelitian.

BAB III. TELAAH PUSTAKA

Berisi tentang hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

Berisi tentang teori-teori yang terkait dengan yang diteliti atau konsep yang sesuai dan melandasi penelitian ini, sehingga dapat mendukung penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu, dijelaskan pula tentang hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

BAB V METODE PENELITIAN

Berisi tentang alat analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB VI. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis data yang disajikan untuk selanjutnya digunakan untuk menguji dan meneliti ketepatan model, dan penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

BAB VII KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Berisi ungkapan kembali secara singkat permasalahan dan pernyataan dari hasil analisis serta implikasi yang dianggap relevan dengan permasalahannya.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Perkembangan PDRB Riil di Indonesia

Krisis ekonomi pada tahun 1997 mempunyai dampak yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini berlanjut menjadi krisis multi dimensi, sehingga mengakibatkan kinerja perekonomian Indonesia menjadi turun tajam pada tahun berikutnya. Hal ini dapat dijelaskan melalui tabel 2.1. sebagai berikut :

TABEL 2.1.
Perkembangan PDRB Riil Indonesia Periode 1998-2003 Menurut Harga Konstan 1993 (Dalam Persen)

Tahun	PDRB riil (milyar rupiah)	Pertumbuhan ekonomi
1998	376.374,9	-13,12
1999	379.557,7	0,84
2000	397.666,3	4,78
2001	411.753,5	3,32
2002	426.942,9	3,66
2003	444.453,5	4,10

Sumber : Laporan tahunan BI, berbagai edisi (diolah)

Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar minus 13,12 %. Hal ini diakibatkan oleh krisis ekonomi yang terjadi. Krisis moneter dan ekonomi tersebut diawali oleh krisis mata uang dinegara-negara tetangga seperti Thailand dan Korea selatan. Pada akhirnya berpengaruh pada perekonomian Indonesia yang ditandai dengan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika serikat. Akan tetapi nilai depresiasi rupiah merupakan nilai terendah jika dibandingkan dengan negara

lainnya. Sebelum memasuki krisis, nilai tukar rupiah terhadap US dolar berada pada Rp.2400,00, namun pada krisis ekonomi ini depresiasi rupiah mencapai puncak pada angka Rp.15.000. secara rata-rata pada tahun 1998 rupiah telah terdepresiasi sebesar 250 %.

Memasuki tahun 1999, perekonomian Indonesia mulai membaik ditandai dengan pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pada angka 0,84%. Kondisi makro ekonomi Indonesia pada tahun 1999 belum mampu menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dengan nilai yang masih terlalu kecil. Pemerintah masih disibukkan oleh resrukturalisasi dan rekapitulasi perbankan dan perusahaan nasional.

Pada tahun 2000, perekonomian Indonesia menunjukkan usaha pemulihan yang lebih baik. Pemulihan ekonomi mencapai angka pertumbuhan sebesar 4,78% lebih tinggi dari perkiraan awal tahunan bank Indonesia sebesar 3,00%-4,00%. Pada tahun 2001 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan sebesar 3,32% dan tahun 2002 naik tipis menjadi 3,66%. Pada tahun 2003 pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 4,10 %.

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2003 semakin membaik dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga konstan 1993, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,10 persen. Nilai PDRB tanpa migas adalah 444,5 trilyun rupiah sementara tanpa migas menjadi 412,7 trilyun rupiah dari 394,5 trilyun rupiah pada tahun 2002.

Struktur perekonomian Indonesia terus mengalami perubahan mengikuti struktur perekonomian Negara maju. dimana kontribusi sektor tradisional telah digeser oleh sektor modern.

TABEL 2.2.
Produk Domestik Bruto Indonesia Menurut Lapangan Usaha Periode 1998-2003 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan perikanan	63.609,5	64.985,3	66.208,9	67.318,5	68.669,7	70.374,4
2. Pertambangan dan Penggalian	37.474,0	36.865,8	38.896,4	39.401,3	40.464,8	40.590,8
3. Industri	95.320,6	99.058,5	104.986,9	108.272,3	111.982,5	115.900,7
4. Listrik, Gas dan Air bersih	5.646,1	6.112,9	6.574,8	7.111,9	753,4	8.052,2
5. Bangunan	22.465,3	22.035,6	23.278,7	24.308,2	25.488,4	27.196,2
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	60.130,7	60.093,7	63.498,3	65.824,6	68.333,2	70.891,3
7. Pengangkutan dan Komunikasi	26.975,1	26.772,1	29.072,1	31.338,9	33.850,1	37.475,5
8. Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan	28.278,7	26.244,6	27.449,4	28.932,3	30.590,8	32.512,5
9. Jasa-jasa	36.475,0	37.184,0	38.051,5	39.245,4	40.080,1	41.459,9

Sumber Data : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (berbagai edisi)

Dari tabel 2.2. diatas dapat dilihat bahwa PDRB sektor industri pada tahun 1998 sebesar Rp 95.320,6 milyar, tahun 1999 sebesar Rp 98.949,4 milyar, tahun 2000 sebesar Rp 104.986,9 milyar, tahun 2001 sebesar Rp 108.272,3 milyar, tahun 2002 sebesar Rp 111.982,5 milyar.

Industri terbesar terjadi pada tahun 2003 yakni sebesar 115.900,7 milyar, Pada tahun 1998 dan 1999 sektor industri mengalami penurunan tajam dari Rp

107.629,7 milyar pada tahun 1997 menjadi hanya Rp 95.320,6 milyar pada tahun 1998, kemudian ditahun 1999 menjadi Rp 98.949,4 milyar pada tahun 2000 sektor industri mengalami kenaikan sebesar Rp 104.986,9 milyar kemudian tahun 2001 menjadi Rp 108.272,3 milyar dan tahun 2002 naik lagi menjadi Rp 111.982,5 milyar. Pada tahun 2003 besarnya peranan sektor industri pada pembentukan PDRB Indonesia adalah sebesar 24.65 persen. Posisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel sebesar 16,32 persen.

Keseluruhan sektor ekonomi pada PDRB, pada tahun 2003 mencatat pertumbuhan positif. Bila diurutkan pertumbuhan ekonomi dari tertinggi ke yang terendah, maka pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,69 persen, diikuti oleh sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 6,82 persen. Sektor ekonomi ketiga tertinggi pertumbuhannya adalah sektor bangunan sebesar 6,70 persen, keempat adalah sektor keuangan-persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,28 persen. Kelima sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 3,74 persen. Berikutnya adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian masing-masing sebesar 3,50 persen, 3,44 persen, dan 2,48 persen, dan 0,46 persen.

Untuk melihat perkembangan PDRB riil di 26 provinsi di Indonesia dapat dilihat pada tabel 2.3. dibawah ini :

TABEL 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993
Menurut Profinsi (Dalam Juta rupiah)

NO	PROVINSI	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	ACEH	10.377.774	9.949.896	9.129.358	9.237.840	9.272.598	9.586.814
2	SUMATERA UTARA	22.118.632	22.910.086	24.016.595	24.911.046	25.925.361	27.071.252
3	SUMATERA BARAT	7.488.442	7.577.036	7.868.238	8.153.962	8.505.563	8.886.574
4	RIAU	19.634.343	20.308.602	21.633.022	22.552.524	23.544.880	24.651.073
5	JAMBI	3.091.842	3.181.314	3.354.146	3.551.168	3.707.172	3.872.380
6	SUMATERA SELATAN	13.053.689	11.637.125	12.025.512	12.312.419	12.775.365	13.352.812
7	BENGKULU	1.621.474	1.678.279	1.744.250	1.814.479	1.892.935	1.989.882
8	LAMPUNG	6.644.128	6.938.425	7.174.254	7.433.265	7.817.341	8.263.917
9	DKI JAKARTA	57.283.502	57.215.224	59.694.419	61.868.256	64.338.829	67.162.699
10	JAWA BARAT	58.847.841	53.442.335	55.660.205	58.311.798	60.594.235	63.179.491
11	JAWA TENGAH	37.793.149	39.394.514	40.941.667	42.305.176	43.775.693	45.605.369
12	DI YOGYAKARTA	4.685.777	4.824.446	5.017.709	5.186.666	5.395.052	5.615.557
13	JAWA TIMUR	54.336.273	55.058.970	56.856.521	58.750.180	60.754.056	63.252.166
14	BALI	7.250.948	7.299.401	7.521.841	7.777.071	8.021.669	8.314.458
15	NTB	3.229.795	3.398.362	4.377.225	4.770.688	4.950.935	5.104.327
16	NTT	2.694.731	2.834.212	2.952.372	3.103.059	3.287.925	3.480.903
17	KALIMANTAN BARAT	6.846.897	7.065.793	7.274.000	7.409.948	7.559.183	7.781.875
18	KALIMANTAN TENGAH	3.992.459	4.032.225	4.092.515	4.203.919	4.341.376	4.552.231
19	KALIMANTAN SELATAN	5.861.453	6.157.938	6.424.665	6.665.209	6.920.356	7.256.171
20	KALIMANTAN TIMUR	20.488.563	21.519.670	22.384.086	23.513.548	24.622.494	25.211.691
21	SULAWESI UTARA	3.661.091	3.036.896	3.220.688	3.357.568	3.490.692	3.671.883
22	SULAWESI TENGAH	2.225.138	2.287.380	2.383.700	2.507.463	2.643.129	2.808.637
23	SULAWESI SELATAN	9.366.229	9.631.076	10.101.948	10.603.662	11.092.996	11.690.525
24	SULAWESI TENGGARA	1.549.515	1.588.457	1.672.193	1.766.340	1.880.970	2.016.261
25	MALUKU	2.935.906	1.336.498	1.297.502	1.276.998	1.315.340	1.361.653
26	PAPUA	8.441.502	8.162.153	8.338.145	8.202.084	8.915.560	9.179.748

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (berbagai edisi)

Dari 26 profinsi di Indonesia, DKI Jakarta merupakan profinsi yang mempunyai PDRB riil terbesar. Nilai PDRB riil DKI Jakarta atas dasar harga konstan tahun 2002 sebesar 64.338.829 juta rupiah atau 16,55 persen dari total 26 profinsi. Profinsi berikutnya adalah Jawa timur dan Jawa barat, dengan nilai

PDRB masing-masing sebesar 60.754.056 juta rupiah dan 60.594.235 juta rupiah atau masing-masing sebesar 14,74 persen dan 13,92 persen terhadap total PDRB di Indonesia. Profinsi dengan PDRB terkecil adalah profinsi Maluku dengan nilai PDRB sebesar 1.315.340 juta rupiah.

Besaran PDRB perkapita suatu daerah tergantung pada tingkat PDRB dan jumlah penduduk. Adapun berdasarkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku dengan migas, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Riau merupakan profinsi yang mempunyai besaran PDRB tertinggi, masing-masing sebesar 43,29 juta rupiah, 30,39 juta rupiah, 12,57 juta rupiah. dari sisi pertumbuhan, pada tahun 2002 seluruh profinsi mengalami pertumbuhan. Hal ini merupakan kemajuan dari tahun sebelumnya, dimana terdapat dua profinsi yang mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu Maluku dan Papua.

Kontribusi ekonomi Sumatera cenderung terus meningkat sejak tahun 1999. pada tahun 1999, kontribusi sumatera masih sebesar 22,60 persen terhadap perekonomian Indonesia. Sebaliknya Jawa Bali, tahun 1999 mempunyai kontribusi 59,72 persen, namun pada tahun 2002 naik menjadi 61,67 persen. Sedangkan pulau-pulau yang lainnya cenderung mempunyai kontribusi yang tetap.

2.2. Perkembangan Angkatan Kerja Indonesia

Untuk menjalankan dan mensukseskan pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan salah satu faktor yang paling dominan, karena penduduk tidak saja menjadi pelaksana tetapi juga menjadi sarana dari pembangunan itu sendiri. Dari dasar pemikiran ini, pembangunan masalah kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, kualitas, dan pengarahannya mobilitas penduduk. Jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagai manifestasi dari pertumbuhan penduduk di wilayah ini, selanjutnya akan menuntut pula tersedianya kesempatan kerja dan lapangan pendidikan. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja berakibat meningkatnya angka pengangguran.

Tenaga kerja adalah modal bagi gerak roda pembangunan. Jumlah komposisi tenaga kerja akan terus berubah seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2002, terdapat 148,7 juta penduduk usia kerja. Sekitar 60,46 persen dari mereka berada di pulau Jawa. Pada tahun 2003, di Indonesia terdapat 152,6 juta jiwa penduduk usia kerja dan sekitar 60,37 persen merupakan mereka yang berada di pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif didalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja untuk usia 10 tahun keatas pada setiap provinsi dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:

TABEL 2.4
Perkembangan Angkatan Kerja Usia 10 Tahun Keatas Menurut Profinsi
(dalam Jiwa)

NO	PROVINSI	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	ACEH	2.244.452	2361.389	2371456	2456321	2356485	2.345.834
2	SUMATERA UTARA	6.780.003	6.851.471	6.375.894	6.696.539	7.319.367	7.181.729
3	SUMATERA BARAT	2.393.636	2.559.403	2.243.887	2.273.673	2.460.542	2.535.928
4	RIAU	2.125.475	2.224.778	2.346.163	2.566.704	2.900.747	3.049.609
5	JAMBI	1.345.349	1.336.873	1.243.502	1.329.973	1.411.066	1.504.428
6	SUMATERA SELATAN	4.222.557	4.302.078	3.886.728	3.980.720	4.424.092	3.998.628
7	BENGGKULU	853.735	923.966	827.675	837.489	1.078.528	944.900
8	LAMPUNG	4.055.997	4.185.824	3.755.645	3.927.320	4.215.534	4.280.626
9	DKI JAKARTA	4.842.825	5.021.408	4.390.745	4.584.489	4.854.833	4.863.715
10	JAWA BARAT	21.306.983	22.652.621	22.126.667	19.834.929	20.975.037	21.808.358
11	JAWA TENGAH	18.483.466	18.896.618	18.795.778	19.138.418	19.794.740	20.276.627
12	DI YOGYAKARTA	1.837.626	1.911.291	1.989.064	1.970.790	2.034.505	2.047.595
13	JAWA TIMUR	20.799.105	21.121.018	20.350.717	21.033.849	21.778.060	22.812.659
14	BALI	2.021.963	2.119.707	2.093.820	2.187.380	2.224.795	2.307.742
15	NTB	2.332.282	2.390.544	2.256.659	2.409.648	2.627.166	2.683.509
16	NTT	2.376.644	2.480.042	2.493.093	2.550.273	2.507.600	2.693.232
17	KALIMANTAN BARAT	2.291.695	2.413.463	2.281.375	2.265.739	2.633.312	2.428.225
18	KALIMANTAN TENGAH	1.021.024	1.015.054	1.030.934	1.073.155	1.179.068	1.115.358
19	KALIMANTAN SELATAN	1.834.052	1.940.421	1.802.355	1.858.043	1.950.978	2.040.601
20	KALIMANTAN TIMUR	1.372.090	1.411.743	1.370.468	1.408.586	1.490.919	1.539.060
21	SULAWESI UTARA	1.510.883	1.536.063	1.283.822	1.056.787	1.161.663	1.222.433
22	SULAWESI TENGAH	1.175.385	1.225.152	1.156.161	1.189.763	1.375.116	1.315.231
23	SULAWESI SELATAN	4.011.886	4.107.298	3.946.735	4.013.361	4.556.126	4.552.123
24	SULAWESI TENGGARA	920.464	965.468	936.889	1.063.003	1.160.496	1.138.105
25	MALUKU	1.109.734	1.150.927	1162301	1.036.197	1125634	1236542
26	PAPUA	1.307.732	1.399.166	1.375.589	1.428.704	1421319	1.595.408

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik (berbagai edisi)

Daerah Jawa masih mendominasi posisi tertinggi dalam jumlah angkatan kerja, meliputi daerah Jawa barat, Jawa timur, Jawa tengah. Adapun tingkat angkatan kerja yang terendah diduduki oleh profinsi Bengkulu, dengan jumlah angkatan kerja sebesar 853.735 juta jiwa pada tahun 1998, 923.966 juta jiwa pada tahun 1999, 827.675 juta jiwa pada tahun 2000, 837.489 juta jiwa pada

tahun 2001, 1.078.528 juta jiwa pada tahun 2002, dan sebesar 944.900 juta jiwa pada tahun 2003. Pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja, kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk periode 2002 dan 2003, dapat dilihat pada tabel 2.5 dibawah ini :

TABEL 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Profinsi tahun
2002-2003 (Dalam persen)

No	Provinsi	2002	2003
1	Aceh	61,80	62,46
2	Sumatera Utara	69,96	65,21
3	Sumatera Barat	65,38	64,37
4	Riau	62,72	62,20
5	Jambi	68,00	64,91
6	Sumatera Selatan	70,47	68,13
7	Bengkulu	70,86	71,72
8	Lampung	70,32	69,37
9	DKI Jakarta	60,83	60,45
10	Jawa Barat	63,33	60,36
11	Jawa Tengah	71,16	70,01
12	DI Yogyakarta	70,17	70,30
13	Jawa Timur	68,87	66,64
14	Bali	76,94	75,83
15	NTB	72,40	75,83
16	NTT	78,47	76,15
17	Kalimantan Barat	71,95	70,10
18	Kalimantan Tengah	69,49	68,96
19	Kalimantanselatan	74,21	72,39
20	Kalimantan Timur	63,66	61,15
21	Sulawesi Utara	60,88	54,30
22	Sulawesi Tengah	71,69	64,40
23	Sulawesi Selatan	62,32	61,75
24	Sulawesi Tenggara	69,26	70,08
25	Maluku	65,62	62,96
26	Papua	76,68	76,03
S	Indonesia	67,76	65,72

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2003, TPAK Indonesia menurun menjadi 65,72 persen dibanding dengan tahun 2002 yaitu sebesar 67,76 persen. Hal ini disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi nasional yang masih belum stabil.

Terdapat berbagai variasi TPAK pada setiap provinsi, berkisar antara 54,30 persen dan 76,15 persen. Provinsi Sulawesi Utara memiliki TPAK terendah dan nilai tertinggi dipegang oleh provinsi NTT. Untuk pengangguran terbuka rendah adalah Kalimantan Timur, diikuti oleh NTT dan Sulawesi Tengah. Dari tahun 2002-2003 terdapat beberapa provinsi yang mengalami penurunan TPAK yang sangat besar, antara lain Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Banten, Jambi, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur. Pada kurun waktu 1999-2002 ada delapan provinsi yang mengalami penurunan TPAK, masing-masing daerah Bengkulu sebesar 3,26 persen, Maluku 1,70 persen, Kalimantan Timur sebesar 1,27 persen, Jawa tengah sebesar 0,99 persen, Jawa Timur sebesar 0,88 persen, Kalimantan Tengah sebesar 0,69 persen, Papua sebesar 0,15 persen, dan Sulawesi Utara sebesar 0,12 persen. Khusus provinsi Papua, penurunan TPAK diikuti oleh penurunan pengangguran terbuka sebesar 0,41 persen. Sementara itu di provinsi lain, mengalami penurunan pengangguran terbuka adalah DKI Jakarta sebesar 0,61 persen.

Pada tahun 2002, dari total angkatan kerja sebesar 100,8 juta, sekitar 90,94 persen dari mereka telah bekerja. Sebagian mereka bekerja 77,67 persen berpendidikan rendah SLTA kebawah), dan yang berpendidikan tinggi(SLTA keatas) sekitar 4,78 persen. Pada tahun 2002, dari 100 orang angkatan kerja 9

orang diantaranya masih mencari pekerjaan. Jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,1 juta jiwa dimana sekitar 58,78 persen dari mereka berpendidikan rendah dan 5,69 persen berpendidikan tinggi. Pada tahun 2003, dari 10 angkatan kerja sekitar 1 orang diantaranya masih mencari pekerjaan, dengan jumlah pengangguran terbuka sekitar 9,5 juta jiwa dimana sekitar 59,68 persen dari mereka berpendidikan tinggi dan 40,32 persen berpendidikan rendah. Ditahun 2003, dari 90,8 juta penduduk yang bekerja, sekitar 46,26 persen bekerja pada sektor pertanian, kemudian sektor perdagangan (18,56 persen), industri (12,04 persen), dan jasa (10,74 persen). Di pulau Jawa peranan sektor pertanian, industri, maupun perdagangan, dan ketenagakerjaan masih mempunyai nilai tertinggi.

2.3. Perkembangan Investasi Indonesia

Penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya adalah langkah awal dalam kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak-lesunya pembangunan.

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Pada tahun 1998, nilai investasi di sektor industri menurun tajam menjadi Rp 44.908,0 milyar dari Rp 79.334,3 milyar ditahun 1997. Kegiatan investasi

diperkirakan membaik pada tahun 2002 ternyata masih kurang menggembirakan. Sehingga secara keseluruhan justru mengalami kontraksi sebesar 0,2% jauh lebih rendah dari tahun 2001 yakni sebesar 7,7% dan tahun 2000 sebesar 13,8%. Semakin memburuknya kegiatan investasi tidak terlepas dari masih tingginya resiko investasi yang berakibat pada buruknya kegiatan investasi pada persetujuan investasi domestik maupun asing dan turunnya nilai impor barang modal dan bahan baku. Tabel 2.6. berikut menunjukkan kondisi investasi Indonesia kurun waktu 1998-2003 :

TABEL 2.6
Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah Menurut Sektor Ekonomi (milyar rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					
	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.315,10	2.408,30	3.559,4	1.318,4	1.453,8	1.929,1
Pertambangan dan Pengalihan	116,3	174	34,1	1.198,1	803,6	752,8
Perindustrian	44.908,00	44.675,5	11.516,8	44.387,3	15.851,4	40.442,7
Listrik, Gas dan Air	138,4	117,9	744,2	-	5,4	466,3
Rekontruksi	1.992,00	817,5	449,1	1.542,3	1.252,2	1.773,7
Pedagang besar dan eceran	1.231,80	1.670,9	170,8	2.541,9	1.188,5	974,4
Transport, Pegudangan dan perhubungan	3.260,5	225,3	629,8	1.510,1	3.125,7	2.002,0
Lembaga keuangan, Perasuranssian, real estate dan perusahaan	1.547,5	995,5	292,6	4.296,1	3,1	1,4
Jasa masyarakat, sosial dan perseorangan	2.239,7	395,1	100	2.021,8	1.623,9	122,4
Jumlah	60.749,3	53.550,0	17.496,5	58.816,0	23.683,7	48.484,8

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Dari tabel 2.6 diatas dapat dilihat bahwa Penanaman modal dalam negeri pada sektor industri pada tahun 1998 sebesar Rp 44.908,00 milyar, tahun 1999 sebesar Rp 44.675,5 milyar, tahun 2000 sebesar Rp 11.516,8 milyar, tahun 2001

sebesar Rp 44.387,3 milyar, tahun 2002 sebesar Rp 15.851,4 milyar, dan tahun 2003 sebesar Rp 40.442,7 milyar.

Industri terbesar terjadi pada tahun 1998 yakni sebesar Rp 44.908,00 milyar, Pada tahun 2000 dan 2002, investasi pada sektor industri mengalami penurunan tajam sebesar dari tahun 1999 sebesar Rp 44.675,5 milyar, menjadi hanya sebesar Rp 11.516,8 milyar pada tahun 2000, kemudian ditahun 2001 dari sebesar Rp 44.387,3 milyar menjadi sebesar Rp 15.851,4 milyar pada tahun 2002.

Dilihat dari total penanaman modal dalam negeri, dapat dilihat fenomena naik turunnya investasi, yaitu Penanaman pada tahun 1998 sebesar Rp 60.749,3 milyar, tahun 1999 sebesar Rp 53.550,0 milyar, tahun 2000 sebesar Rp 17.496,5 milyar, tahun 2001 sebesar Rp 58.816,0 milyar, tahun 2002 sebesar Rp 23.683,7 milyar, dan tahun 2003 sebesar Rp 48.484,8 milyar.

Perkembangan penyebaran modal didaerah dan disertai nilai investasi daerah pada tahun 1998-2003 dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

TABEL 2.7
Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri yang Telah Disetujui Oleh Pemerintah
Menurut Profinsi (milyar rupiah)

NO	PROVINSI	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	ACEH	1297.3	94.2	981.3	64.4	1.2	98.9
2	SUMATERA UTARA	1101.5	981.4	611.9	1192.9	2275.5	868.5
3	SUMATERA BARAT	336.8	571.9	607.1	7.5		289.8
4	RIAU	4925.1	8981.0	33814.3	5705.4	1474.3	770.7
5	JAMBI	1429.4	3001.7	1162.9	771.5	447.4	107.4
6	SUMATERA SELATAN	882.7	146.6	67.7	655.6	12.0	443.8
7	BENGKULU	4.0	121.4	116.5	625.6	72.3	538.9
8	LAMPUNG	692.6	611.1	297.8		1680.6	81.9
9	DKI JAKARTA	4289.7	1012.5	3474.9	7845.5	4013.6	2667.6
10	JAWA BARAT	8117.1	17874.6	9601.9	4614.5	5001.7	4008.9
11	JAWA TENGAH	2574.9	804.3	1486.9	2184.8	1462.9	1947.2
12	DI YOGYAKARTA	16.0	34.4	119.9	105.5	43.4	23.0
13	JAWA TIMUR	3883.8	1559.1	2871.2	3122.6	1673.6	1078.3
14	BALI	804.6	995.1	58.4	540.1	28.8	706.5
15	NTB	638.5	14.9	803.5	566.5	0.4	5.8
16	NTT	650.0	68.1	1.5	1081.0	15.0	122.3
17	KALIMANTAN BARAT	416.9	222.6	21.2	10.0	23.7	485.5
18	KALIMANTAN TENGAH	9093.4	3561.4	331.5	164.3	586.7	516.0
19	KALIMANTAN SELATAN	640.6	161.3	3117.5	188.4	149.4	346.4
20	KALIMANTAN TIMUR	1815.7	1010.9	1013.3	3414.1	2084.5	752.3
21	SULAWESI UTARA	1132.4	51.8	1487.5	1174.8	127.8	142.3
22	SULAWESI TENGAH	630.7	425.9	271.4	1068.3	1.7	217.7
23	SULAWESI SELATAN	11168.7	696.6	166.9	300.4	141.4	167.1
24	SULAWESI TENGGARA	91.1	504.0	29880.9	16653.6	3181.9	29239.8
25	MALUKU	44.5	20.0			68.0	2.9
26	PAPUA	1278.7	8252.0	42.5	3137.5	154.2	995.9

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (berbagai edisi)

Dapat diketahui bahwa pada tahun 1998, daerah jawa masih mendominasi nilai investasi secara keseluruhan dengan nilai investasi sebesar 68.630,8 milyar rupiah, meninggalkan daerah lain dan tetap bertahan pada tahun-tahun berikutnya. Profinsi Maluku memiliki tingkat investasi terendah dalam enam tahun penelitian, yaitu 44,5 milyar rupiah pada tahun 1998, 20,0

milyar rupiah pada tahun 1999, 27,1, 68,0 milyar rupiah pada tahun 2001, dan 2,9 milyar rupiah pada tahun 2003.

2.4. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah daerah

Pengeluaran pemerintah daerah meliputi (a) pengeluaran rutin (belanja pegawai, biaya pemeliharaan, belanja barang, angsuran pinjaman, subsidi, dana pensiun, dan lain-lain), (b) pengeluaran pembangunan (bidang ekonomi, sosial, umum, subsidi pembangunan daerah, pembayaran pinjaman, lain-lain), (c) urusan kas dan perhitungan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah.

TABEL 2.8
Anggaran Belanja Indonesia Periode 2000-2003 (Trilyun Rupiah)

Rincian	Tahun			
	2000	2001	2002	2003
3. Belanja Negara	197,0	340,3	332,5	374,8
2. Belanja pemerintah pusat	163,5	258,9	742,1	254,1
a. pengeluaran rutin	137,5	213,4	195,1	189,1
- belanja pegawai	30,7	38,3	41,1	47,3
- Belanja barang	9,4	9,9	12,0	13,9
- Pembiayaan bunga utang	54,6	89,6	87,1	69,2
- Subsidi	30,8	66,3	46,2	43,9
- Pengeluaran rutin lainnya	11,7	9,4	9,5	14,8
b. pengeluaran Pembangunan	26,2	45,5	47,1	65,0
II. Dana Perimbangan	33,5	81,5	90,3	120,7

Sumber Data : Perekonomian Indonesia, Laporan Tahunan BI (berbagai edisi)

Pada tahun 2001, total pengeluaran mengalami peningkatan sebesar 2,77 persen dibandingkan dengan tahun lalu atau naik menjadi 340,3 trilyun rupiah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pembangunan dari 26,2 trilyun rupiah pada tahun anggaran 2000 menjadi 45,5 trilyun rupiah pada tahun

2000 atau naik sebesar 0,97 persen. Sedangkan pengeluaran rutin mengalami penurunan sebesar 0,97 persen dari 11,7 trilyun rupiah pada tahun anggaran 2000 menjadi 9,4 trilyun rupiah pada tahun 2001.

Pada tahun 2002, alokasi belanja terbesar masih tetap untuk pengeluaran rutin pemerintah pusat yang mencapai 57,7 persen dari total belanja belanja negara, diikuti oleh belanja untuk daerah sebesar 30 persen, dan pengeluaran pembangunan sebesar 12,3 persen. Sebagian besar dari anggaran digunakan untuk pembayaran bunga utang sebesar 27,4 persen, diikuti oleh Dana Alokasi Umum sebesar 21,1 persen, dan subsidi sebesar 12,2 persen dari total belanja Negara.

Pada tahun 2003 alokasi belanja daerah dan pembangunan meningkat masing-masing menjadi sebesar 32,2 persen dan 17,3 persen dari total belanja negara, sementara untuk melihat pengeluaran pemerintah pada tingkat provinsi dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

TABEL 2.9

Realisasi Pengeluaran Pemerintah daerah diberbagai Profinsi (Juta rupiah)

NO	PROVINSI	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	ACEH	171.702	245.143	245.885	494.760	1.384.492	1.522.155
2	SUMATERA UTARA	342.560	449.052	416.773	916.216	1.021.284	1.162.034
3	SUMATERA BARAT	148.717	199.319	229.414	389.729	452.408	539.729
4	RIAU	304.206	448.256	542.782	1.134.048	1.714.855	1.968.365
5	JAMBI	117.118	151.659	160.647	228.955	363.492	412.794
6	SUMATERA SELATAN	265.490	274.341	271.470	569.899	692.170	957.634
7	BENGKULU	98.674	123.220	126.358	175.756	193.109	288.834
8	LAMPUNG	156.152	207.597	229.566	356.789	539.472	659.204
9	DKI JAKARTA	1.657.316	3.295.514	3.127.364	6.856.701	8.556.136	11.162.388
10	JAWA BARAT	660.000	917.771	1.159.104	2.222.994	2.368.343	3.309.049
11	JAWA TENGAH	587.720	796.491	857.279	1.491.684	2.168.005	2.783.796
12	DI YOGYAKARTA	124.340	157.013	189.130	329.286	398.271	497.215
13	JAWA TIMUR	708.056	829.446	833.816	1.873.207	2.815.050	3.058.972
14	BALI	148.703	235.438	251.971	568.761	740.081	663.828
15	NTB	115.987	165.383	220.729	158.714	353.735	403.285
16	NTT	122.850	182.398	158.606	214.048	318.675	445.655
17	KALIMANTAN BARAT	143.740	222.004	238.191	351.969	442.282	532.146
18	KALIMANTAN TENGAH	160.480	227.866	222.980	332.848	299.885	481.000
19	KALIMANTAN SELATAN	193.085	273.004	268.994	418.610	495.977	558.864
20	KALIMANTAN TIMUR	319.293	531.818	521.473	1.380.255	1.397.116	2.755.000
21	SULAWESI UTARA	133.378	172.210	164.553	256.464	398.631	409.095
22	SULAWESI TENGAH	125.583	169.117	176.954	223.567	267.436	381.823
23	SULAWESI SELATAN	236.508	292.276	308.937	510.111	672.412	752.386
24	SULAWESI TENGGARA	106.123	142.988	164.495	178.702	257.160	354.936
25	MALUKU	113.349	144.010	141.234	205.579	239.294	446.193
26	PAPUA	357.586	447.251	451.048	715.832	2.144.502	2.291.300

Sumber : Statistik Indonesia, Badan Pusat Statistik (berbagai edisi)

Pengeluaran tertinggi pada 26 profinsi di Indonesia pada tabel diatas, pada kurun waktu 1998-2003 masih di duduki oleh DKI Jakarta. Secara umum dapat dilihat bahwa pengeluaran pada setiap tahunnya relatif meningkat. Profinsi Maluku mengalami penurunan pengeluaran pada tahun 2000 yaitu sebesar 141.234 juta rupiah menjadi 144.010 juta rupiah pada tahun 1999. Sumatera Barat dari 449.052 juta rupiah pada tahun 1999 menjadi 416.773 juta rupiah pada tahun 2000, Sumatera

Selatan menurun dari 274.341 juta rupiah pada tahun 1999 menjadi 271.470 juta rupiah pada tahun 2000. Kalimantan Tengah mengalami penurunan pengeluaran pemerintah dari 332.848 juta rupiah pada tahun 2001 menjadi 299.885 juta rupiah pada tahun 2002.



BAB III

TELAAH PUSTAKA

Untuk membahas lebih lanjut tentang Peranan sektor publik terhadap PDRB Riil di Indonesia periode 1998-2003, disini penulis menggunakan hasil penelitian dari peneliti terdahulu, antara lain :

1. Penelitian Sung Tai Kim (1995)

Dari penelitian “Sung Tai Kim“ tentang “The Role of Local Public Sectors in Regional Economics Growth in Korea”. Dengan menggunakan model analisis data panel (panel pooled data) kuantitatif yaitu melalui metode regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan penelitian. Dengan bentuk umum dari fungsi Gross Regional Product (GRP) sebagai berikut :

$$GRP = f(L, I_p, I_g, G, R)$$

Dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 (I_p/Y)_{it} + \beta_2 L_{it} + \beta_3 (I_g/Y)_{it} + \beta_4 [(G/Y)G]_{it} + \beta_5 (R/Y)_{it} + \beta_6 D80 + \mu$$

Keterangan :

- Y adalah Gross Regional Product (GRP)
- I_g adalah Jumlah investasi pemerintah
- I_p adalah Jumlah Investasi pada sektor pertambangan dan industri
- L adalah Jumlah Tenaga kerja yang bekerja pada pertambangan dan industri

- G adalah Jumlah konsumsi/pengeluaran pemerintah
- R adalah Penerimaan pemerintah
- β_0 adalah konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ adalah Koefisien Elastisitas
- D80 adalah variabel dummy untuk krisis ekonomi dan politik Korea pada tahun 1980
- μ adalah variabel gangguan

Dalam penelitian yang dilakukan tersebut penulis mengatakan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Korea pada tahun 1970-1991 adalah tenaga kerja dan tingkat investasi. Sedangkan Investasi pemerintah, penerimaan pemerintah, dan pengeluaran pemerintah merupakan variabel sektor publik yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun hasil penelitian melalui pengujian statistik diperoleh adalah :

1. Variabel Penerimaan pemerintah local dari sektor pajak dan non-pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Korea sebesar 1.744 %.
2. Variabel Investasi pemerintah lokal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Korea sebesar 2.296 %.
3. Variabel Pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Korea sebesar 3.353 %.
4. variabel Tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Korea dengan elastisitas sebesar 0.1679

5. variabel Investasi swasta berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Korea dengan elastisitas sebesar 0.1385
6. variabel dummy untuk 1980 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Korea.

2. Penelitian Prabowo Sutanto (2004)

Dari penelitian Prabowo Sutanto tentang “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1986-2002”. Dengan menggunakan model analisis data *time series* atau runtut waktu kuantitatif yaitu melalui metode regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan penelitian. Dengan bentuk umum dari fungsi Produk Domestik Bruto (PDB riil) sebagai berikut :

$$\text{PDB riil} = f(L, I, Ex, S)$$

dengan model regresi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

$$\text{Ln } Y = \text{Ln } \alpha_0 + \alpha_1 \text{Ln } X_1 + \alpha_2 \text{Ln } X_2 + \alpha_3 \text{Ln } X_3 + \alpha_4 \text{Ln } X_4$$

Dimana : Y = PDB riil (juta rupiah)

X₁ = jumlah Angkatan Kerja (jiwa)

X₂ = Nilai Investasi asing (juta us \$)

X₃ = Nilai Ekspor (milyar rupiah)

X₄ = Tabungan Domestik (Juta Rupiah)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh “Prabowo Sutanto“ tersebut penulis mengatakan yang mempengaruhi besar kecilnya Pertumbuhan ekonomi Indonesia, ialah jumlah Angkatan kerja, Investasi asing, Nilai ekspor, dan tingkat Tabungan Domestik. Alat analisis yang digunakan oleh peneliti meliputi analisis regresi, pengujian statistik (pengujian secara parsial, pengujian secara serempak, uji ketepatan model), pengujian sumsi klasik (uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas). Adapun hasil penelitian melalui pengujian statistik diperoleh adalah :

1. Variabel Angkatan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.000000136 %.
2. Variabel Investasi Asing berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.000235 %.
3. Variabel Nilai Ekspor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.0000814 %.
4. Variabel Tabungan Domestik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0.187876 %

BAB IV

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS

4.1. Tinjauan Tentang PDRB Riil dan Pertumbuhan Ekonomi

4.1.1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

• Robert Solow dan Trevor Swan

Dikembangkan oleh Robert M Solow (1970) dari Amerika Serikat dan T.W. Swan (1956) dari Australia. Teori ini menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan utama dengan teori Harrod-Domar adalah pada adanya pengaruh teknologi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara kapital (K) dan tenaga kerja (L). Pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal dan teknologi), sehingga model fungsi produksinya ialah :

$$Q = f (K , L, t)$$

Dimana :

Q = tingkat output produksi

L = tingkat penggunaan tenaga kerja

K = tingkat akumulasi modal

T = tingkat kemajuan teknologi.

peran kemajuan teknologi didalam pertumbuhan ekonomi akan sangat tinggi.

Temuan Solow pada tahun menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi

Amerika Serikat yang setinggi 2.75 persen pertahun pada periode 1909-1949, sebesar 1.5 persen disumbangkan oleh kemajuan teknologi sedangkan sisanya disebabkan oleh penambahan jumlah pnggunaan faktor produksi. Agar factor produksi selalu berada dalam kapasitas penuh perlu mekanisme yang menyamakan investasi dengan tabungan (*dalam keadaan full employment*).

Pertumbuhan yang mantap membutuhkan syarat bahwa :

$$MPK = a \frac{Y}{K} = p$$

$MPK = \text{marginal productivity of capital}$

Jika p sudah tertentu dan a tetap konstan maka Y dan K harus tumbuh dengan tingkat yang sama.

- **Walt Whitman Rostow**

Menurut Rostow, proses pembangunan ekonomi bisa dibedakan kedalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional (the traditional society), prasyarat untuk tinggal landas (the preconditions for take-off), tinggal landas (the take-off), menuju kedewasaan (the drive to maturity), dan masa konsumsi tinggi (the age of high mass-consumtion). Dasar pembedaan tahap pembangunan ekonomi menjadi 5 tahap tersebut adalahj karakteristik perubahan keadaan ekonomi, social, dan politik. Pembangunan ekonomi bukan hanya berarti perubahan struktur ekonomi suatu ekonomi suatu negara yang ditunjukkan oleh

menurunnya peranan sektor pertanian dan peningkatan peranan sektor industri saja, akan tetapi berarti pula suatu proses yang menyebabkan :

1. perubahan orientasi organisasi ekonomi, politik, dan social yang pada mulanya berorientasi pada suatu daerah menjadi berorientasi keluar
2. perubahan pandangan masyarakat mengenai jumlah anak dalam keluarga, yaitu dari menginginkan banyak anak menjadi keluarga kecil
3. perubahan dalam kegiatan investasi masyarakat, dari melakukan investasi yang tidak produktif (menumpuk emas, membeli rumah, dan sebagainya) menjadi investasi yang produktif
4. perubahan sikap hidup dan adat istiadat yang kurang merangsang pembangunan ekonomi (kurang menghargai waktu, prestasi perorangan dan sebagainya)

● **Adam Smith**

proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tergantung pada dua aspek utama yaitu:

1. pertumbuhan output total, yaitu unsur pokok yang mendasari produksi suatu negara, meliputi sumberdaya alam yang tersedia, sumberdaya insani dan stok barang modal yang ada
2. pertumbuhan penduduk, yakni jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah berlaku lebih tinggi dari tingkat upah pas-pasan untuk hidup. Jika tingkat upah lebih tinggi dari tingkat upah yang hanya cukup untuk

hidup, maka tingkat kematian menurun, orang akan menikah pada usia muda, jumlah kelahiran meningkat.

Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Tingkat upah yang tinggi dan meningkat jika permintaan tenaga kerja tumbuh lebih cepat dari pada penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat. Oleh karena itu laju pertumbuhan akan tenaga kerja ditentukan oleh laju pertumbuhan stok modal (akumulasi modal) dan laju pertumbuhan output.

4.1.2 Indikator pertumbuhan ekonomi

Ada beberapa cara/pendekatan dalam melakukan penghitungan PDRB antara lain adalah dengan menjumlahkan nilai tambah sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian pada suatu periode waktu tertentu yang disebut sebagai PDRB sektoral, Produk Domestik Regional Bruto ini dapat berasal dari berbagai sektor antara lain : Pertanian, Industri, Pertambangan, Perdagangan, Listrik, Air, Konstruksi, Gas, Transportasi, Bank dan lain-lain. Dan penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran, yaitu menghitung untuk apa hasil produksi suatu kegiatan ekonomi digunakan yang disebut dengan PDRB pengeluaran. Harga yang digunakan dalam penghitungan PDRB dapat berdasarkan harga berlaku (disebut sebagai PDRB atas dasar harga berlaku) atau menggunakan harga dasar pada tahun dasar tertentu sebagai dasar

penghitungan (disebut dengan PDRB atas dasar harga konstan). Untuk melihat kontribusi sektor sektor ekonomi dalam suatu perekonomian dilakukan dengan menghitung kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB atas dasar harga berlaku, sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan melihat pertumbuhan dari PDRB atas dasar harga konstan.

Salah satu indikator terbaik dalam melihat pertumbuhan ekonomi adalah dengan menghitung *Gross Domestic Product* (GDP) (Mankiw, 2002; 16).

4.1.3. Metode Perhitungan GDP

Untuk menghitung GDP dapat dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu (Mankiw, 2003; 17):

1. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dalam perhitungan GDP yang melihat *final goods* merupakan perhitungan GDP sebagai nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh perekonomian. Sedangkan perhitungan GDP dengan melihat *value added* adalah perhitungan GDP dengan menghitung nilai tambah suatu barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian. Perhitungan GDP dengan melihat nilai akhir barang dan jasa dapat menghindarkan *double-account* dalam perhitungan GDP.

2. Sisi Pendapatan

GDP merupakan total *income* yang didapat dari faktor produksi dalam negeri. Disini kita menganggap pengeluaran sama dengan *income*, karena pada

setiap transaksi, pengeluaran pembeli menjadi pendapatan bagi penjual. sehingga jumlah total dari pengeluaran sama dengan pendapatan. GDP juga merupakan penjumlahan nilai tambah dari semua level produksi.

Komponen GDP meliputi dapat dilihat dalam bentuk persamaan di bawah ini :

$$Y = C + I + G + NX$$

Dimana,

$$Y = \text{GDP}$$

C = Konsumsi, terdiri dari keseluruhan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

I = Investasi, terdiri dari barang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain

G = *Government Expenditure* (pengeluaran pemerintah), merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk membeli barang dan jasa

NX = *Net Export*, merupakan keseluruhan barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

Ada 2 macam nilai GDP, yaitu GDP nominal dan GDP riil. GDP riil menghitung jumlah *output* atas barang dan jasa yang dapat diproduksi oleh perekonomian suatu negara dalam periode waktu tertentu (Dornbusch, et al., 1998; 32). Sedangkan GDP nominal menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh perekonomian suatu negara dalam periode waktu tertentu (Dornbusch, et al., 1998; 32). Dalam Mankiw (2002 ; 22) GDP riil dianggap

merupakan pengukur terbaik kinerja ekonomi suatu daerah karena kepuasan masyarakat diukur dengan seberapa besar barang dan jasa yang dapat dikonsumsi, tanpa melihat harga dari barang dan jasa yang dihasilkan.

4.2. Teori Tentang Tenaga Kerja

Di Indonesia, pengertian tenaga kerja atau *man power* adalah mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan, dan yang sedang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga. Tiga golongan terakhir, yakni pencari kerja, bersekolah, dan mengurus rumah tangga, walaupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik mampu bekerja dan dapat sewaktu-waktu bekerja (P. Simanjuntak, 1985 : 2)

Pengertian tenaga kerja ialah penduduk yang berumur dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap Negara. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia adalah minimum 10 tahun tanpa batas usia maksimum, jadi setiap orang atau penduduk yang sudah berusia 10 tahun keatas adalah tergolong sebagai tenaga kerja. Di Negara India menggunakan rentang usia antara 14-60 tahun. Amerika Serikat menetapkan usia kerja minimum adalah 16 tahun tanpa batas usia maksimum. Sedangkan batas usia kerja yang ditetapkan oleh bank dunia adalah antara 15-64 tahun (Dumairy, 1996 : 74).

Indonesia tidak menganut batas usia maksimum karena Indonesia belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian

perusahaan swasta. buat golongan ini pun pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Oleh sebab itu, mereka yang telah mencapai usia pension masih tetap harus bekerja, dengan kata lain sebagian besar penduduk Indonesia yang sudah usia pension masih aktif dalam kegiatan ekonomi, dan tetap digolongkan sebagai tenaga kerja (Simanjuntak, op.cit : 2-3).

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja, menganggur, dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan. Ketiga golongan tersebut sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja, oleh sebab itu kelompok ini sering disebut sebagai *potensial labor force*.

Angkatan kerja adalah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, menerima pendapatan akan tetapi bukan dari imbalan langsung atas kerjanya (Dumairy, op.cit :74-75).

4.3. Teori Tentang Investasi

Penanaman modal merupakan langkah awal dalam kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, investasi pada hakekatnya adalah langkah awal dalam kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi

tingkat pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak-lesunya pembangunan (Dumairy, 1996:132)

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sadono Sukirno,1992:107).

Investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah modal atau mempertahankan kapital. Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik, mesin, kantor, dan barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. termasuk dalam barang kapital adalah rumah-rumah dan barang yang belum terjual atau yang belum dipakai dalam tahun bersangkutan, jadi investasi adalah pengeluaran yang menambah persediaan kapital (M.Suparmoko, 1994:79-80).

Investasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu investasi riil dan investasi finansial. Yang dimaksud dengan investasi riil adalah investasi terhadap barang-barang yang tahan lama yang akan digunakan dalam proses produksi, sedangkan investasi finansial adalah investasi terhadap surat-surat berharga seperti pembelian saham, obligasi, dan lain sebagainya (Guritno Mangkoe Soebroto, Algifari, 1991:75).

Dalam hubungannya dengan investasi yang diusahakan, terdapat dua teori yakni *gradualist* dan teori *big push* (irawan, M.Suparmoko 1995 :94-95).

1. Teori usaha perlahan (Gradualist)

Teori ini berpendapat bahwa negara yang terbelakang sebaiknya jangan terlalu cepat mengadakan industrialisasi, karena akan ada beban yang harus dibebankan kepada negara yang miskin. Pemilihan teknik-teknik produksi dan investasi didasarkan pada biaya-biaya relatif dari faktor produksi. Mengusahakan untuk memajukan industri kecil, pembangunan masyarakat desa dan langkah semacam ini yang menggunakan kelebihan tenaga kerja, kegiatan yang membutuhkan kapital akan diusahakan bila keuntungan melebihi dari kegiatan yang sifatnya padat karya.

2. Teori dorongan besar (*Big Push*)

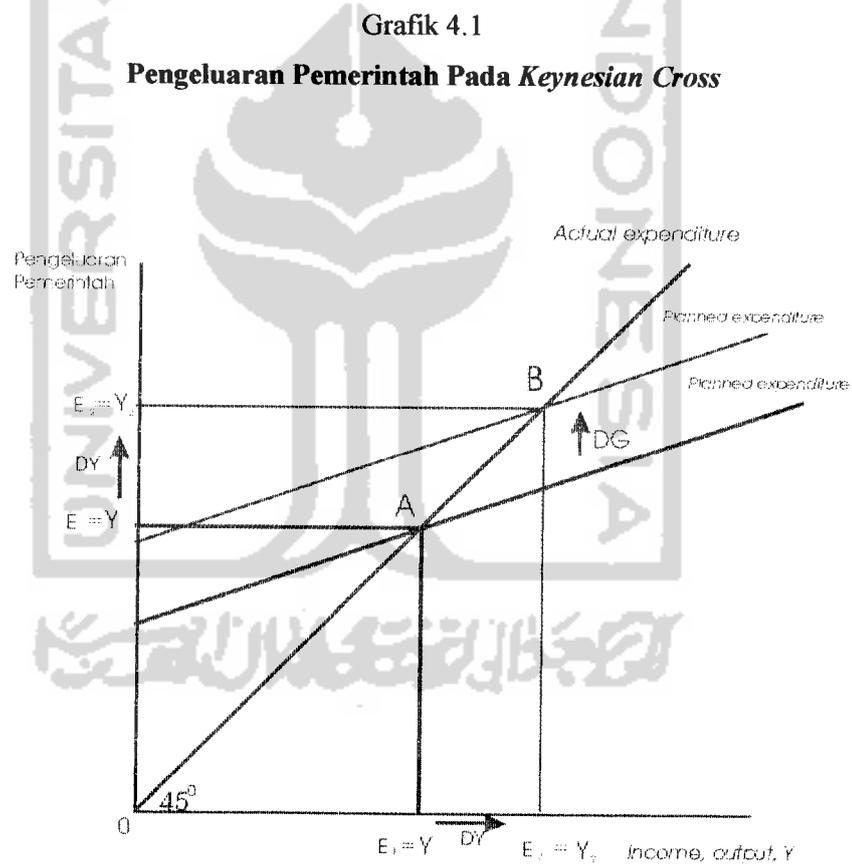
Teori ini secara singkat mengatakan bahwa bila hanya ada sedikit usaha untuk menaikkan pendapatan, hal ini hanya akan mendorong pertumbuhan penduduk saja, yang nantinya akan menghambat pertumbuhan pendapatan perkapita. Usaha harus dilakukan secara besar-besaran untuk mengatasi perubahan penduduk. Konsentrasi pada investasi yang selanjutnya menghasilkan alat-alat capital untuk mempertahankan pertumbuhan output.

4.4. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah daerah daerah meliputi (a) pengeluaran rutin (belanja pegawai, biaya pemeliharaan, belanja barang, angsuran pinjaman, subsidi, dana pensiun, dan lain-lain), (b) pengeluaran pembangunan (bidang ekonomi, sosial, umum, subsidi pembangunan daerah, pembayaran pinjaman,

lain-lain), (c)urusan kas dan perhitungan. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169).

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi secara teori diterangkan dalam *Keynesian Cross* (Mankiw, 2003; 263).



Pada grafik 4.1 dapat dilihat peningkatan pengeluaran pemerintah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui pendapatan dan tingkat output. Peningkatan besarnya pengeluaran pemerintah berhasil merubah keseimbangan dari titik A ke titik B, yang berarti peningkatan pertumbuhan (Y).

Bailey (1995; 43) membagi teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah menjadi dua, yaitu teori makro dan teori mikro. Model makro dapat menjelaskan perhitungan jangka panjang pertumbuhan pengeluaran pemerintah, sedangkan model mikro menjelaskan perubahan secara *particular* komponen-komponen pengeluaran pemerintah.

Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu (Mangkoesobroto, 1993; 169):

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah.
2. Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah.
3. Teori Peacock & Wiseman.

4.4.1. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, prosentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi,

dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam Mangkoesoebroto (1993; 170), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

4.4.2. Hukum Wagner

Teori Wagner tentang perkembangan pengeluaran pemerintah disebut sebagai *Wagner law of increased government activity*. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini didasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1993; 170). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$\frac{P_k PP_1}{PPK_1} < \frac{P_k PP_2}{PPK_2} < \dots < \frac{P_k PP_n}{PPK_n}$$

P PP : Pengeluaran Pemerintah perkapita

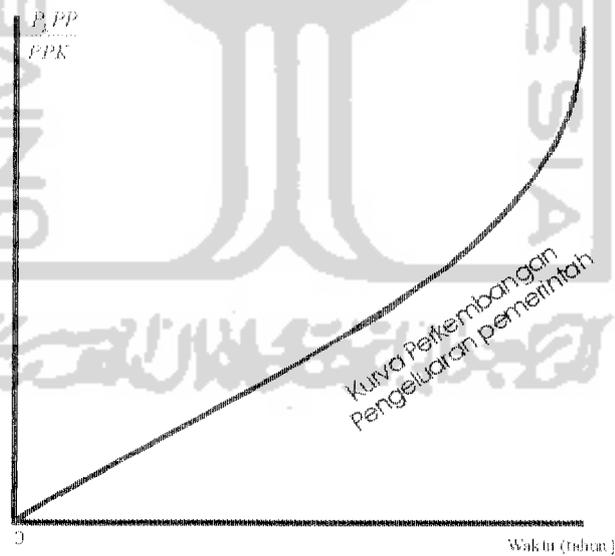
PPK : Pendapatan perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1,2,...n : Jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam grafik 4.2 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1993; 172).

Grafik 4.2

Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner



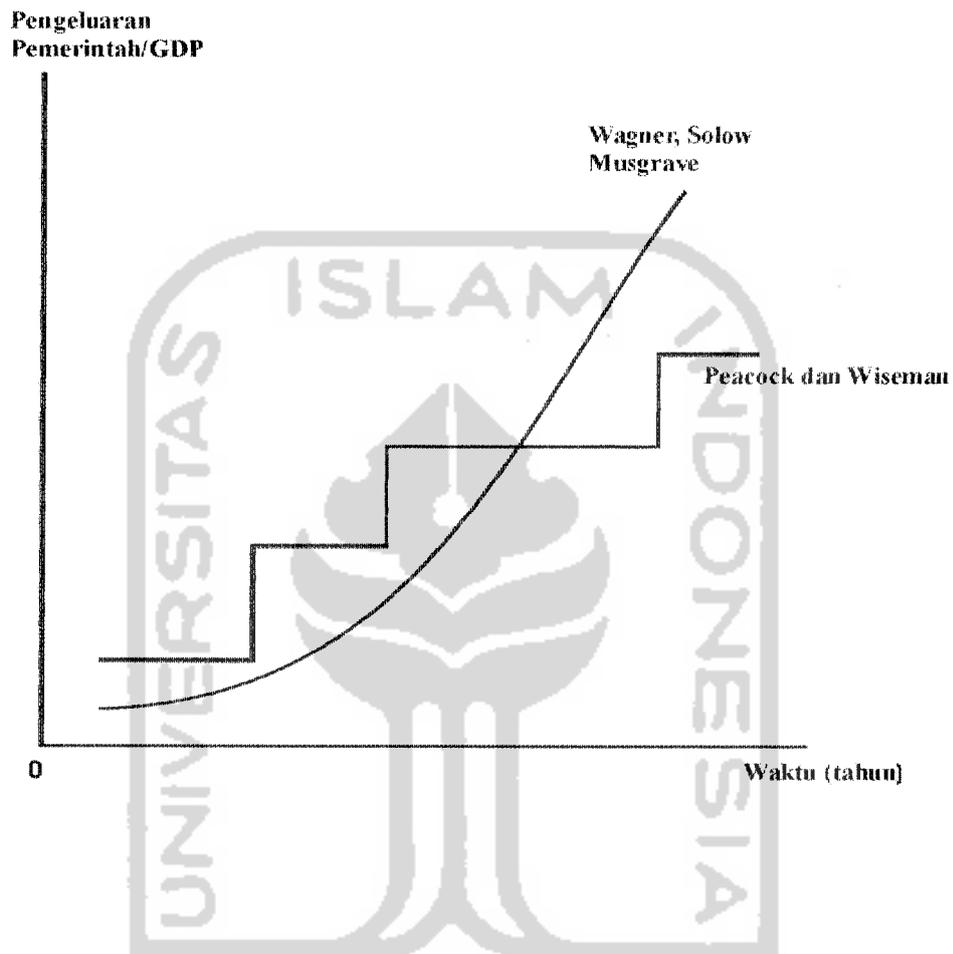
4.4.3. *The Displacement Effect*

Dari ketiga teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah tersebut, teori Peacock & Wiseman dianggap sebagai teori dan model yang terbaik (Mangkoesoebroto, 1993; 173). Teori mereka sering disebut sebagai *The Displacement Effect*, dimana teori ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Dalam Mangkoesoebroto (1993; 173) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak. Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut (Mangkoesoebroto, 1993; 173) :

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.”

Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga.

Grafik 4.3
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



4.5. Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pembangunan Daerah

4.5.1. Hubungan Keuangan pusat dan daerah

Ada empat kriteria untuk menjamin sistem hubungan keuangan pusat–daerah yang baik, *pertama*, harus memberikan pembagian kewenangan yang rasional berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya; *kedua*, menyajikan suatu bagian

yang memadai dari sumber-sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; *ketiga*, sejauh mungkin membagi pengeluaran pemerintah secara adil diantara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu; *keempat*, pajak dan retribusi yang di kenakan Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. (Sidik, 1999 dalam Edy Suandi Hamid, Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Politik Indonesia)

Sistem hubungan keuangan pusat-daerah menunjukkan peranan masing-masing dalam pengalokasian anggaran pembangunan. sistem ini di Indonesia dirangkum dalam tiga prinsip yakni, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan. Titik besar desentralisasi di Indonesia lebih di titik beratkan pada daerah Tingkat II karena daerah Tingkat II merupakan ujung tombak pembangunan yang lebih mengetahui permasalahan di daerah. (Mudrajat k, dalam Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri 1995)

Ada beberapa faktor positif atau menguntungkan dari adanya desentralisasi tersebut, yaitu, (1) Menyebarkan Pusat Pengambilan Keputusan (*decongestion*), (2) Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, (3) Keputusan yang diambil bias lebih realistik dan lebih sesuai dengan kondisi obyek dan permasalahan lokal, (4) Adanya Penghematan (*economic efficiency*), (5) Menimbulkan keikutsertaan masyarakat yang lebih tinggi, (6) Mendorong

solidaritas Nasional. (PAU SE-UGM,2000 dalam Edy Suandi Hamid dalam Sistem Ekonomi Utang Luar Negeri dan Isu-Isu Politik Indonesia)

Menurut undang-undang (UU) No 25 Tahun 1999 yang dimaksudkan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara kesatuan yang mencakup : (1) pembagian keuangan antara pusat dan daerah, (2) pemerataan antara daerah proporsional, demokratis, adil, dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah yang sejalan dengan kewajiban dan pembiayaan kewenangan, serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.

4.6. Hipotesa

Sebagai pedoman dalam melakukan penelitian ini, maka disusun hipotesa sebagai berikut :

1. Jumlah Tenaga kerja berpengaruh secara positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia
2. Jumlah Investasi berpengaruh secara positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia
3. Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh secara positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia

4. Jumlah angkatan kerja, jumlah investasi, dan pengeluaran pemerintah daerah secara bersama-sama mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil di Indonesia



BAB V

METODE PENELITIAN

5.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan jenis data panel (Panel pooled data) dari tahun 1998 - 2003 di 26 propinsi di Indonesia. Data tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) riil
- Jumlah Angkatan kerja masing-masing Propinsi
- Jumlah Investasi masing-masing Propinsi
- Jumlah Pengeluaran pemerintah daerah masing-masing Propinsi

Data di atas diperoleh dari berbagai sumber, yaitu :

- Biro Pusat Statistik (BPS) Indonesia
- Sumber lain yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

5.2. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh, digunakan analisa kuantitatif yaitu melalui metode regresi data panel. Menurut Hsiao (1990: 1-2), penggunaan data panel dalam penelitian ekonomi mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan data *time series* atau *cross section*. Pertama, ia bisa memberikan peneliti sejumlah data yang banyak, menaikkan derajat kebebasan dan mengurangi kolinearitas antar variabel penjelas, oleh karena itu akan menghasilkan estimasi ekonometrik yang efisien. Kedua, data longitudinal lebih

memberikan sesuatu yang tak dapat dipecahkan oleh data *time series* ataupun *cross section*.

Baltagi (2001 : 5), menyebutkan beberapa keunggulan data panel adalah estimasi data panel dapat menunjukkan adanya heterogenitas dalam tiap unit, lebih informatif, mengurangi kolinearitas antar variabel, meningkatkan derajat kebebasan, lebih efisien, data panel lebih cocok digunakan untuk menganalisis adanya dinamika perubahan, merupakan alat studi analisis dengan metode yang lengkap, dan meminimkan bias yang mungkin ada dalam agregasi.

Analisis menggunakan bantuan program Eviews dengan menggunakan metode GLS (Generalized Least Square), karena terdapat nilai lebih dalam GLS dibandingkan dengan OLS dala, mengestimasi parameter regresi. Gujarati (2003 : 394) menyebutkan bahwa metode OLS yang umum tidak mengasumsikan bahwa variable adalah heterogen, pada kenyataannya variasi data pada *pooling* cenderung heterogen. Metode GLS sudah memperhitungkan heterogenitas yang terdapat pada variable independent secara eksplisit sehingga metode ini mampu untuk menghasilkan estimator yang memenuhi criteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan penelitian.

Dengan bentuk umum dari fungsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai berikut :

$$\text{PDRB} = f(L, I, G)$$

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah log linier, dengan bentuk persamaan sebagai berikut :

$$\text{Log PDRB} = \beta_0 + \beta_1 \text{Log L} + \beta_2 \text{Log I} + \beta_3 \text{Log G} + \mu$$

Keterangan :

- PDRB adalah Produk Domestik Regional Bruto
- L adalah Jumlah Tenaga kerja
- I adalah Jumlah Investasi
- G adalah Pengeluaran pemerintah daerah
- β_0 adalah konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ adalah Koefisien Elastisitas
- μ adalah variabel gangguan

5.3. Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

a. Uji Signifikansi Fixed effect

Pendekatan ini menetapkan bahwa α adalah sebagai kelompok yang spesifik atau berbeda dalam constant term dalam model regresinya. Formulasi yang biasa dipakai dalam model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar unit dapat dilihat dalam perbedaan constant term. Fixed

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n X_i + \delta_i + \epsilon$$

Fixed.

effect model ini mengasumsikan bahwa tidak ada time spesifik dan hanya memfokuskan pada individual specific effect (Hsiao, 29-30).

Sebelum model diestimasi, maka dilakukan terlebih dahulu uji spesifikasi model apakah yang akan dipakai dengan menggunakan uji F statistik. Uji hipotesis bahwa $\mu = 0, \lambda = 0$ atau $\mu \neq 0, \lambda \neq 0$ salah satu uji yang dapat dipakai adalah dengan menggunakan estimator variable dummy dan F test, dengan membandingkan R^2 pada unrestricted model dan restricted model, sebagai berikut :

$$F(n-1, nT-n-K) = \frac{(R_u^2 - R_p^2) / (n-1)}{(1 - R_u^2) / (nT-n-K)}$$

dimana, u mengacu pada unrestricted model dan p mengacu pada restricted model, n = jumlah unit cross section, T = jumlah unit waktu dan K = jumlah parameter yang akan diestimasi (Green, 2000:256).

- Jika $F_{hitung} > F_{kritis}$ maka H_0 ditolak, artinya intersep untuk semua unit tidak sama, metode yang digunakan adalah Fixed effect
- Jika $F_{hitung} < F_{kritis}$ maka H_0 diterima, artinya intersep untuk semua unit sama, metode yang digunakan adalah model OLS.

b. Uji Signifikansi Random effect

Pendekatan ini melibatkan korelasi antara error term karena berubahnya waktu maupun berbedanya unit observasi. Dengan asumsi slope dan intersep tiap unit adalah berbeda.

Breusch dan Pagan (1980) dalam Green (Green, 2000:572-573) menyarankan uji Lagrange Multiplier untuk menguji random effect yang didasarkan atas residual.

Dengan hipotesis nul, LM didistribusikan mengikuti Chi-squares dengan satu derajat kebebasan. Jika hasil perhitungan $LM > X^2$ dengan satu derajat kebebasan, maka H_0 ditolak, artinya metode random effect bisa digunakan dalam mengestimasi persamaan regresi data panel dan lebih baik dari pada metode OLS biasa.

c. Uji Hausman

Tujuan uji ini adalah untuk memilih estimasi dengan model Fixed effect atau Random effect. Uji Hausman ini didasarkan pada asumsi bahwa LSDV di metode fixed effect adalah GLS efisien sedangkan metode OLS tidak efisien, dilain pihak alternatifnya adalah metode OLS efisien dan metode GLS tidak efisien. Karena itu hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga uji Hausman bias dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Unsur penting dalam uji ini adalah kovarian matrix dari perbedaan vector.

Hasil metode Hausman adalah bahwa perbedaan kovarian dari estimator yang efisien dengan estimator yang tidak efisien adalah nol.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi Chi-squares dengan *degree of freedom* sebanyak k dimana k adalah jumlah variable independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang tepat untuk mengestimasi model data panelnya adalah model fixed effect, jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang digunakan adalah model Random effect.

5.4 Kriteria statistik

Pengujian hipotesis statistik, yang meliputi pengujian hipotesis secara serempak (uji F-Test statistik), pengujian hipotesis secara individu (uji t-test statistik) serta pengujian ketetapan perkiraan (R^2).

a. Pengujian Parsial (uji t-test statistik)

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T-Test statistik. Tujuan penggunaan uji T-Test statistik adalah untuk menguji parameter secara parsial atau sendiri-sendiri dengan tingkat kepercayaan tertentu.

$H_0: \beta_i \leq 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

$H_0: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

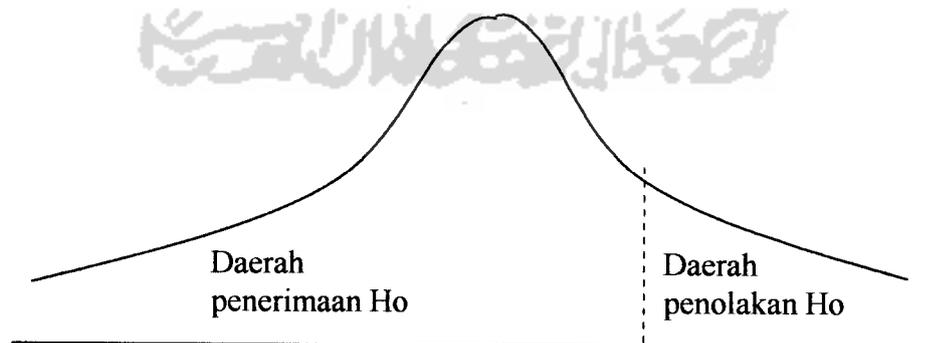
Pengambilan keputusan :

- jika t hitung $<$ t tabel, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika t hitung $>$ t tabel maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen.

T hitung dapat dicari dengan rumus :

$$t = \frac{\beta_i}{Se\beta_i}$$

Gambar 5.1
Kurva Distribusi t



b. Pengujian Secara Serempak (Uji F- Test Statistik)

Uji F-test satatistik dilakukan untuk mengetahui proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara serempak atau gabungan, dilakukan pengujian hipotesa secara serentak dengan menggunakan uji F.

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3$, artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3$, artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

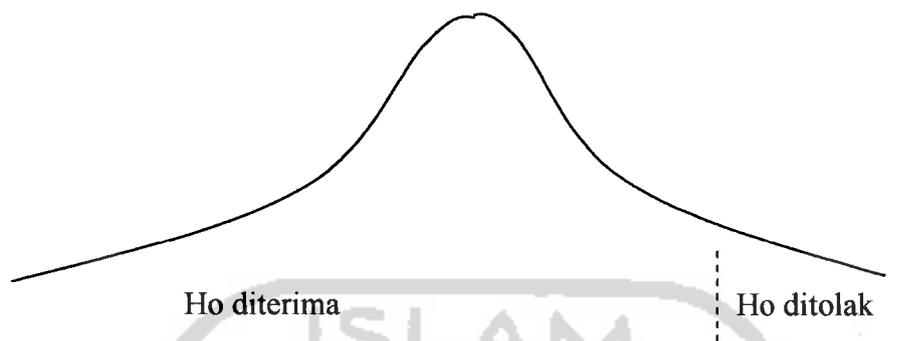
Pengambilan keputusan :

- Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak. Berarti variabel independent tersebut secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

F- hitung diperoleh dengan rumus :

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (n-k)}$$

Gambar 5.2
Kurva Distribusi F



c. Pengujian Ketetapan Perkiraan (uji R^2)

R^2 adalah suatu besaran yang lazim dipakai untuk mengukur kebaikan kesesuaian (*goodness of fit*), yaitu bagaimana garis regresi mampu menjelaskan fenomena yang terjadi. R^2 mengukur proporsi (bagian) atau persentase total variasi data (variabel independent) yang dijelaskan oleh model regresi. Semakin tinggi nilai R^2 , maka garis regresi sampel semakin baik. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 , yang terletak pada $0 < R^2 < 1$. (Damodar Gujarati : 1987)

Nilai R^2 diperoleh dari :

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah kuadrat refresi}}{\text{Total jumlah kuadrat}} = \frac{\text{ESS}}{\text{TSS}}$$

$$= \frac{\text{TSS} - \text{RSS}}{\text{TSS}} = 1 - \frac{\text{RSS}}{\text{TSS}}$$

BAB VI

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan pusat statistik yang merupakan data *panel* dengan runtut waktu sebanyak 6 tahun observasi, yaitu dari tahun 1998 – 2003 dan dengan cross section sebanyak 26 provinsi di Indonesia.. Data tersebut meliputi data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil Atas Dasar Harga Konstan 1993, Jumlah Angkatan Kerja, Jumlah Investasi yang dihitung dengan jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), dan Pengeluaran Pemerintah daerah.

Sedang analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian secara statistik digunakan untuk memilih model estimasi yang paling tepat dalam menganalisis data panel, yaitu dengan uji signifikansi *Fixed effect* melalui F-test pada perbedaan koefisien determinasi antara model OLS dan Fixed effect, uji *Breusch-pagan* dengan menggunakan metode *Lagrange Multiplier*, dan uji *Hausman*. Kemudian melihat tingkat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang meliputi pengujian secara parsial variabel bebas dengan menggunakan uji t, uji serempak variabel bebas dengan menggunakan uji F, serta uji ketepatan model yaitu dengan koefisien determinasi.

6.1. Pengujian Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga ada pengaruh variabel Angkatan kerja, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah daerah, baik secara individu maupun secara bersama-sama terhadap PDRB riil di Indonesia.

Proses analisis regresi yang dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program *evIEWS* dengan menggunakan metode regresi GLS (*Generalized Least Square*), akan menghasilkan parameter yang masing-masing variabel independen, dimana parameter tersebut menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi log linier berganda. Model linier ini digunakan karena diagram sebaran (*scatter plot*) menunjukkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang cenderung mendekati garis lurus (*linier*). Sedangkan bentuk log dipilih karena dengan transformasi ke dalam bentuk log varians data akan semakin kecil sehingga biasanya ketepatan prediksinya lebih tinggi (hasil garis regresi lebih halus).

Untuk pengujian signifikansi hasil regresi digunakan uji *t* dan uji *F*, akan tetapi sebelumnya dilakukan beberapa uji untuk memilih model estimasi yang paling baik dalam menganalisis data panel tersebut. Adapun uji tersebut adalah sebagai berikut :

6.1.1. Uji Signifikansi Fixed Effect

Uji ini dilakukan guna memilih model yang tepat dalam menganalisis data panel, antara OLS tanpa variable *Dummy* atau *Fixed effect*. Dengan asumsi bahwa ols mempunyai slope dan intersep yang sama, sedangkan fixed effect mempunyai slope yang sama tapi intersep yang berbeda. Untuk menghitung estimasi ini dapat dilihat dari R-squares hasil regresi OLS dibawah ini:

TABEL 6.1.

Hasil Regresi Metode OLS

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 02/17/06 Time: 21:08
 Sample: 1998 2003
 Included observations: 6
 Balanced sample
 Total panel observations 156
 Convergence achieved after 25 iteration(s)
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.444829	0.017493	139.7616	0.0000
LOG(X1?)	0.811508	0.002227	364.3653	0.0000
LOG(X2?)	0.021359	0.000841	25.39841	0.0000
LOG(X3?)	0.109675	0.003183	34.45496	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.999960	Mean dependent var	74.88456	
Adjusted R-squared	0.999959	S.D. dependent var	88.70486	
S.E. of regression	0.568555	Sum squared resid	49.13481	
F-statistic	1257599.	Durbin-Watson stat	0.579998	
Prob(F-statistic)	0.000000			

(Hasil regresi lengkap dapat dilihat dilampiran 2)

Dan dengan membandingkan dengan R squares pada hasil regresi dengan menggunakan metode fixed effect sebagai berikut:

TABEL 6.2.

Hasil Regresi Metode Fixed Effect

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 04/18/06 Time: 21:02
 Sample: 1998 2003
 Included observations: 6
 Total panel observations 156
 Convergence achieved after 9 iteration(s)
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.18383	0.235296	56.03095	0.0000
LOG(X1?)	0.124100	0.016895	7.345269	0.0000
LOG(X2?)	0.002074	0.000637	3.255827	0.0015
LOG(X4?)	0.096390	0.003305	29.16667	0.0000
D2001?	0.007791	0.002716	2.868487	0.0048
D_ACEH	-0.201556	0.074577	-2.702668	0.0078
D_BALI	-0.389366	0.015073	-25.83153	0.0000
D_SUMUT	0.566876	0.015698	36.11245	0.0000
D_SUMBAR	-0.333104	0.013624	-24.45064	0.0000
D_LAMPUNG	-0.497447	0.012057	-41.25784	0.0000
D_BENGKULU	-1.657687	0.025571	-64.82775	0.0000
D_JAKARTA	1.335100	0.013952	95.69142	0.0000
D_JABAR	1.207109	0.030749	39.25664	0.0000
D_JATIM	1.214788	0.029984	40.51469	0.0000
D_JATENG	0.905760	0.028334	31.96710	0.0000
D_YGY	-0.744754	0.015243	-48.85996	0.0000
D_RIAU	0.560355	0.014175	39.53231	0.0000
D_NTT	-1.280719	0.016305	-78.54539	0.0000
D_NTB	-0.944635	0.118359	-7.981067	0.0000
D_MALUKU	-1.872624	0.608615	-3.076861	0.0026
D_PAPUA	-0.309788	0.024871	-12.45556	0.0000
D_KALBAR	-0.426638	0.013472	-31.66733	0.0000
D_KALTIM	0.665089	0.021107	31.51090	0.0000
D_KALTENG	-0.880349	0.023358	-37.69010	0.0000
D_KALSEL	-0.531025	0.017128	-31.00340	0.0000
D_SULUT	-1.097556	0.037781	-29.05051	0.0000
D_SULTENG	-1.401781	0.023526	-59.58473	0.0000
D_SULTEG	-1.723408	0.025425	-67.78323	0.0000
D_JAMBI	-1.084051	0.021113	-51.34534	0.0000
D_SULSEL	-0.185698	0.012957	-14.33234	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.999992	Mean dependent var	47.54928	
Adjusted R-squared	0.999990	S.D. dependent var	27.50798	
S.E. of regression	0.088214	Sum squared resid	0.980487	
F-statistic	519728.0	Durbin-Watson stat	1.717154	
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.994691	Mean dependent var	15.93765	
Adjusted R-squared	0.993470	S.D. dependent var	1.091638	
S.E. of regression	0.088217	Sum squared resid	0.980555	
Durbin-Watson stat	1.151101			

Dengan $H_0: \mu=0, \lambda=0$ dan $H_a: \mu \neq 0, \lambda \neq 0$, salah satu uji yang dapat digunakan adalah dengan F test dengan hasil F hitung sebesar 5,0393.

Dengan nilai numerator 25 dan nilai denominator 126, dan dengan mengikuti distribusi statistik F, maka pada $\alpha=1\%$ dan $\alpha=5\%$ didapat nilai F kritis sebesar 1,95 dan 1,61. dengan demikian F hitung $>$ F kritis maka menolak H_0 . Dengan kata lain model yang tepat dalam menganalisa data panel didalam penelitian ini adalah model Fixed effect dari pada OLS.

6.1.2. Uji Signifikansi Random Effect (Breusch-Pagan)

Uji ini dilakukan untuk memilih model estimasi yang lebih baik antara model OLS dengan model Random Effect. Perhitungan metode ini menggunakan nilai residual dari metode OLS. Dikembangkan oleh Breusch Pagan dengan didasarkan pada nilai residual dari metode OLS, adapun hasil perhitungannya adalah 318, 5195652. Dengan mengikuti distribusi Chi-squares, pada $df = 3$, pada $\alpha=1\%$ dan $\alpha=5\%$ diperoleh nilai LM hitung yaitu 13,2767 dan 9,48773, dengan demikian LM hitung $>$ nilai kritis LM, maka metode yang Random effect juga bisa digunakan dalam menganalisis data panel dan lebih baik daripada metode OLS. Prosedur uji signifikansi random Effect selengkapnya dapat dilihat dalam Green (2000:629).

6.1.3 Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih antara model estimasi dengan menggunakan model Fixed Effect atau dengan menggunakan model Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan pada ide bahwa penggunaan metode Fixed effect dan GLS adalah efisien sedangkan metode OLS tidak efisien. Di lain

itu hipotesis nulnya adalah menyatakan bahwa metode Fixed effect akan menghasilkan estimasi yang tidak bias dan konsisten, sedangkan Random effect menghasilkan estimasi yang efisien. Sedangkan hipotesis alternatifnya adalah Fixed effect konsisten sedangkan Random effect akan menghasilkan estimasi yang bias. Adapun hasil perhitungan uji Hausman adalah 23,57.

Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-squares, dengan df sebesar 4 dan pada $\alpha=1\%$ dan $\alpha=5\%$, didapat nilai kritis yaitu 13,2767 dan 9,48773. Oleh karena nilai Statistik Hausman > nilai kritisnya, berarti menolak H_0 , dengan kata lain Spesifikasi Random effect tidak benar, maka **model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Fixed effect.**

6.2. Kriteria Statistik

6.2.1. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis apakah secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil perhitungan komputer program Eviews dapat disusun tabel uji F seperti berikut:

TABEL 6.3.

Hasil Uji F (Uji Koefisien Regresi Secara Serentak)

F Stat (hitung)	DF	F tabel α 5%	Probabilitas	Keterangan	Kesimpulan
5197	3; 126	2.45	0.0000	F stat > F tabel	F signifikan

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran 1)

Karena F Statistik(hitung) = 5197 lebih besar dari F tabel pada derajat kebebasan pembilang $k-1$ ($4-1$)=3 lawan penyebut $n-k$ ($147-4$)=143 yaitu 2,45 maka H_0 ditolak atau hasil uji F signifikan. Atau karena Probabilitas $F = 0,0000$ lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 5% maka uji F signifikan. Artinya dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen PDRB riil Indonesia.

6.2.2. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi variabel tak bebas yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Dari hasil regresi diperoleh nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,999992. Ini artinya 99.9% perubahan PDRB riil Indonesia dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variable Jumlah Angkatan kerja, Investasi, dan Pengeluaran Pemerintah daerah secara bersama-sama. Sedang yang 0.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

6.2.3. Pengujian secara parsial (uji-t)

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen PDRB riil. Hasil uji t tertera dalam tabel berikut :

TABEL 6.4.
Hasil Uji t (Uji Koefisien Regresi Secara Individu)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	t tabel 5% 1sisi	Keterangan
ANGKATAN KERJA	0.124100	0.016895	7.345	0.0000	1.645	Positif signifikan
INVESTASI	0.002074	0.000637	3.255	0.0015	1.645	Positif signifikan
PENGELUARAN PEMDA	0.096390	0.003305	29.16	0.0000	1.645	Positif signifikan

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran 1)

Kriteria pengujian dengan Uji t yang digunakan adalah jika t hitung lebih dari t tabel atau jika probabilitas $< 0,05$ maka variabel yang diuji adalah signifikan.

6.2.3.1. Pengujian terhadap β_1 (Angkatan Kerja)

Hipotesa :

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 > 0$ artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria

H_0 akan diterima dan H_a akan ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_a akan ditolak dan H_0 akan diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Uji – satu sisi

Tingkat signifikan (α) = 5 %

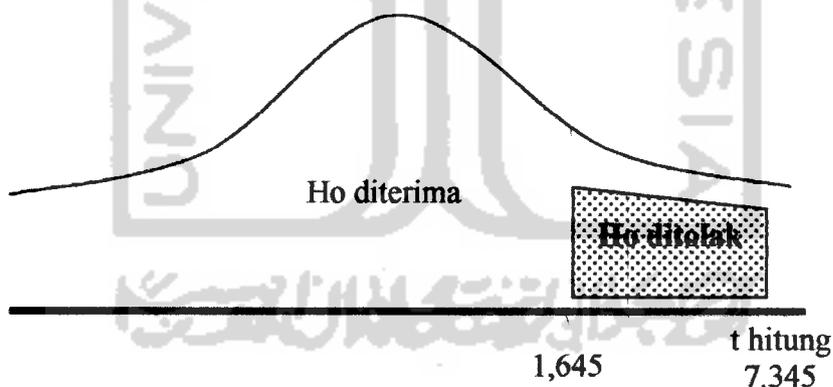
t_{tabel} pada α 5% ; $df = n - k = 147 - 4 = 143$

t_{tabel} : 1,645

Karena nilai t_{hitung} ($7.345 > t_{\text{tabel}}$ (1,645) maka H_0 ditolak, H_a diterima atau karena Probabilitas $0,0000 < 0,05$ maka t hitung variabel Jumlah Angkatan kerja adalah signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga jumlah angkatan kerja mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDRB riil di Indonesia terbukti.

GAMBAR 6.1

KURVA PENGUJIAN TERHADAP ANGGKATAN KERJA



6.2.3.2. Pengujian terhadap β_2 (Investasi)

Hipotesa:

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 > 0$ artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria:

H_0 akan diterima dan H_a akan ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

H_a akan ditolak dan H_0 akan diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

Uji – satu sisi

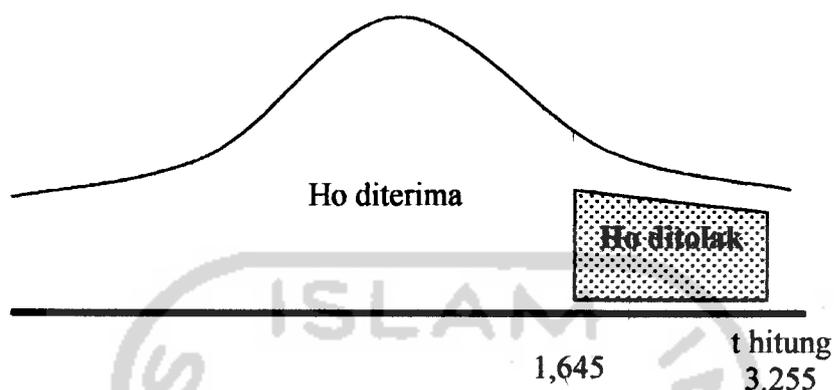
Tingkat signifikan (α) = 5 %

t_{tabel} pada α 5% ; $df = n - k = 147 - 4 = 143 \rightarrow t_{tabel} : 1,645$

Karena nilai $t_{hitung} (3.255) > t_{tabel} (1,645)$ maka H_0 ditolak, H_a diterima atau karena Probabilitas $0,0015 < 0,05$ maka t hitung variabel Investasi signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga Investasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDRB riil di Indonesia terbukti.

GAMBAR 6.2

KURVA PENGUJIAN TERHADAP INVESTASI

6.2.3.3. Pengujian terhadap β_4 (Pengeluaran Pemerintah daerah)

Hipotesa :

$H_0 : \beta_1 = 0$ artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 > 0$ artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria :

Ho akan diterima dan Ha akan ditolak jika $t_{hitung} < t_{tabel}$

Ha akan ditolak dan Ha akan diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$

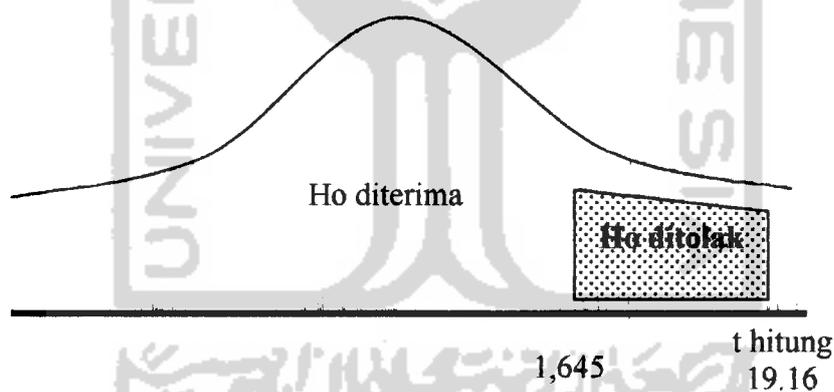
Uji – satu sisi

Tingkat signifikan (α) = 5 %

t_{tabel} pada α 5% ; $df = n - k = 147 - 4 = 143 \rightarrow t_{\text{tabel}} : 1,645$

Karena nilai $t_{\text{hitung}} (29.16) > t_{\text{tabel}} (1,645)$ maka H_0 ditolak, H_a diterima atau karena Probabilitas $0,000 < 0,05$ maka t hitung variable Penegeluaran Pemerintah signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga Pengeluaran Pemerintah daerah mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap PDRB riil di Indonesia terbukti.

GAMBAR 6.3
KURVA PENGUJIAN TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH
DAERAH



6.3. Interpretasi Masing-masing Variabel Independen

Setelah pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t dan uji F maka Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

6.3.1. Analisis pengaruh Jumlah Angkatan kerja terhadap PDRB riil

Koefisien variabel angkatan kerja = 0.124100. Tanda parameter untuk jumlah angkatan kerja adalah positif yang berarti jika jumlah angkatan kerja naik satu persen maka PDRB riil Indonesia akan naik 0.124100 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).

Jumlah pekerja didalam suatu perekonomian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena jumlah tenaga kerja yang besar dengan produktifitas yang tinggi akan mendorong nilai positif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi yang sangat menentukan dalam jumlah nilai output yang dihasilkan dalam suatu negara. Semakin tinggi jumlah pekerja, maka semakin tinggi pula tingkat PDRB riil negara tersebut.

Dalam penelitian ini nilai koefisien jumlah angkatan kerja menempati peringkat tertinggi dalam mempengaruhi PDRB riil di Indonesia. Dengan melihat tingginya pengaruh tersebut, maka sudah seharusnya terdapat usaha untuk mendorong tumbuhnya jumlah pekerja yang bukan hanya dari kuantitasnya, tapi juga kualitas sumber daya manusianya. Memperluas

kesempatan kerja, mempertajam ketrampilan pekerja domestik, perbaikan tingkat upah yang layak, kesehatan, serta kebijakan pemerintah dalam peningkatan alokasi anggaran ke pendidikan.

6.3.2. Analisis pengaruh Investasi terhadap PDRB riil

Koefisien variabel Investasi = 0.002074. Tanda parameter untuk jumlah Investasi adalah positif yang berarti jika jumlah investasi naik satu persen maka PDRB riil Indonesia akan naik 0.002074 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus)

Investasi berpengaruh secara positif terhadap PDRB riil di Indonesia, karena semakin tinggi nilai investasi maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Investasi merupakan salah satu faktor produksi yang berupa modal yang berguna dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal dan memperlancar proses produksi dan akhirnya berpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Akan tetapi dalam hasil penelitian ini, didapat nilai koefisien yang paling kecil dalam mempengaruhi PDRB riil Indonesia dibandingkan dengan variabel lainnya. Ini menjelaskan bahwa dalam enam tahun terakhir, proses penanaman modal dalam negeri masih rendah. Salah satu hal yang mempengaruhi rendahnya nilai investasi pada enam tahun terakhir adalah perilaku masyarakat yang lebih banyak melakukan pertumbuhan konsumsi dari pada pertumbuhan investasi (Tambunan, 2001:43).

Hal lainnya yang sangat berpengaruh adalah situasi politik dan ekonomi yang masih belum stabil, hal ini menimbulkan kekhawatiran dalam proses investasi dalam negeri, banyak investor yang belum berani untuk menanamkan modal, dengan demikian kurangnya modal akan sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

- 6.3.3.** Analisis pengaruh Pengeluaran Pemerintah daerah terhadap PDRB riil
- Koefisien variabel Pengeluaran pemerintah daerah = 0.096390. Tanda parameter untuk jumlah Pengeluaran pemerintah daerah adalah positif yang berarti jika jumlah Pengeluaran pemerintah daerah naik satu persen maka PDRB riil Indonesia akan naik 0.0096390 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa diduga pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap PDRB riil di Indonesia, maka sudah seharusnya pengeluaran pemerintah daerah mendapat perhatian dalam pengelolaannya, demi mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Peningkatan anggaran pada pengeluaran pembangunan yang dapat membantu meningkatkan kinerja perekonomian, perhatian khusus pada pengeluaran dalam menyediakan kebutuhan publik juga dapat meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan keadaan perekonomian yang lebih baik.

BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

7.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan kebijakan publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia periode tahun 1998-2003, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh signifikan dan bernilai positif, berarti dalam penelitian ini hasilnya sesuai dengan hipotesis peneliti didepan yang berhipotesis yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara Jumlah Angkatan Kerja dengan tingkat PDRB riil di Indonesia. Ini berarti jika terjadi kenaikan pada besaran Jumlah angkatan kerja akan menyebabkan naiknya PDRB riil di Indonesia
2. Investasi berpengaruh signifikan dan bernilai positif, berarti dalam penelitian ini hasilnya sesuai dengan hipotesis peneliti didepan yang berhipotesis yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara Investasi dengan tingkat PDRB riil di Indonesia. Ini berarti jika terjadi kenaikan pada besaran Investasi akan menyebabkan naiknya PDRB riil.
3. Pengeluaran pemerintah daerah berpengaruh signifikan dan bernilai positif, berarti dalam penelitian ini hasilnya sesuai dengan hipotesis peneliti didepan yang berhipotesis yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan dan positif antara pengeluaran pemerintah dengan PDRB riil di

Indonesia. Ini berarti jika terjadi kenaikan pada besaran pengeluaran Pemerintah akan menyebabkan naiknya PDRB riil di Indonesia

4. Secara bersama-sama variabel independent yakni jumlah angkatan kerja, investasi dan pengeluaran pemerintah daerah, berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent PDRB riil di Indonesia
5. (R^2) sebesar 0.9999 yang menunjukkan bahwa secara statistik variasi perubahan PDRB riil di Indonesia dipengaruhi oleh variabel Jumlah Angkatan Kerja, Investasi, Pengeluaran Pemerintah daerah, dengan kata lain 99,99% dari PDRB riil di Indonesia dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan dalam metode ini, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model ini.
6. Meskipun pengaruh kebijakan publik daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia masih dinilai kecil, akan tetapi dapat dilihat bahwa peran pemerintah dalam kebijakan publik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi suatu faktor positif yang mesti diperhitungkan dalam usaha mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

7.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai masukan, saran terhadap pemerintah dalam rangka meningkatkan PDRB riil di Indonesia, disampaikan implikasi sebagai berikut :

1. melihat tingginya pengaruh jumlah angkatan kerja terhadap PDRB riil di Indonesia, maka sudah seharusnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Perlu ditempuh beberapa kebijaksanaan dalam usaha peningkatan produktivitas pekerja, antara lain dengan peningkatan kualitas pendidikan dengan peningkatan pengalokasian dana pendidikan, menambah ketrampilan (skill) pekerja, kebijaksanaan dalam sektor upah buruh dimasa sekarang ini, serta peningkatan sumber daya manusia dengan perbaikan gizi, peningkatan pelayanan kesehatan, dan tidak lupa kebijaksanaan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
2. Pengaruh positif Investasi terhadap PDRB riil di Indonesia, masih dinilai terlalu kecil. Peningkatan modal pada sektor ekonomi masih perlu ditingkatkan pada keseimbangannya dengan tingkat pekerja. Kondisi perekonomian yang masih dilanda ketidakstabilan masih menjadi salah satu alasan rendahnya tingkat investasi dalam negeri. Kekhawatiran dalam berinvestasi masih mewarnai iklim perekonomian. Selain itu, dalam lima tahun terakhir perekonomian lebih didominasi oleh pengeluaran konsumsi dari pada pengeluaran investasi. Dalam hal ini pemerintah harus lebih berupaya untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi yang kondusif untuk investor, prosedur yang sederhana dalam rangka mendorong tumbuhnya investasi, kebijaksanaan dalam undang-undang dan peraturan yang konsisten, serta memulihkan kondisi keamanan kearah yang lebih baik bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

3. Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah yang positif dan signifikan terhadap PDRB riil di Indonesia, menjadi sebuah acuan dalam memperhitungkan kembali anggaran pengeluaran pembangunan, yang mencakup pada penekanan pada sektor yang mendukung tumbuhnya perekonomian, sektor publik, yaitu dari segi infrastruktur berupa sarana dan prasarana transportasi, pendidikan, kesehatan, keamanan, efisiensi dalam jumlah pegawai pemerintah dengan mempertimbangkan penggunaan teknologi dan sumber daya manusianya. Alokasi subsidi yang lebih mengena pada sasaran, transparansi APBN terhadap kejahatan keuangan negara. Dan untuk mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang merata, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah harus juga diperhitungkan, dengan melihat perbedaan sumber daya setiap daerah dalam rangka menetralkan adanya ketimpangan fiskal yang mencolok.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, (1999), *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik. (1998-2003). *Statistik Kesejahteraan rakyat*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (1998-2003). *Statistik Indonesia*. Jakarta: BPS
- Badan Pusat Statistik. (1998-2003). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah provinsi*. Jakarta: BPS
- Dumairy, (1996), *Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Green, William H, (2000), *Econometric Analysis, Fourth Edition*, Prentice Hall.inc
- Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. New York : Mc Graw-Hill.
- Gujarati, Damodar (1995), *Ekonometrika Dasar*. Jakarta. Erlangga.
- Hamid, Edy Suandi, (2004), *Sistem Ekonomi Utang Luar Negri dan Isu-Isu Ekonomi Politik Indonesia*. Yogyakarta UII Press
- Hamid, Edy Suandi, (1999), *Peran dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian* . Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4, No. 1, 41-53.
- Hsiao, Cheng. (1995). *Analysis of Panel Data, Econometric society Monographs, No 11*. Cambridge University Press.
- Mankiw, Gregory N. (2003) *Macroeconomics* . Harvard University. New York: Worth Publishers.
- Mangkusubroto, Guritno. (1994), *Kebijakan ekonomi publik di Indonesia (substansi dan urgensi)*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mubyarto (2000), *Membangun Sistem Ekonomi*. Yogyakarta BPFE
- Sidik, Machfud (2002) “Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia).” Makalah disampaikan pada seminar *Setahun Implementasi Kebijakan Otonomio Daerah di Indonesia*, Jogjakarta 13 Maret 2002.

- Sriyana, J. (1999), *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan dan Kemandirian Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 4, No. 1, 103-113.
- Sutanto, Prabowo. (2004), *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1986-2002*, Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Suparmoko. (1987), *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, BPFE.
- Tarigan, Robinson. (2005), *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Tai Kim, Sung, (1995) . *The Role of Local Public Sektors in Regional Economic Growth in Korea* . Asian Economic Journal .
- Tambunan, Tulus, (2001). *Perekonomian Indonesia Teori dan Empirik*, Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Usman, Marzuki, (1997), *Kebijakan Keuangan Negara dalam Kaitannya dengan APBN dan Permasalahannya*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 2, No. 1, 29-39.

LAMPIRAN 1

Hasil Regresi dengan metode Fixed effect

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: GLS (Cross Section Weights)
 Date: 04/18/06 Time: 21:02
 Sample: 1998 2003
 Included observations: 6
 Total panel observations 156
 Convergence achieved after 9 iteration(s)

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.18383	0.235296	56.03095	0.0000
LOG(X1?)	0.124100	0.016895	7.345269	0.0000
LOG(X2?)	0.002074	0.000637	3.255827	0.0015
LOG(X4?)	0.096390	0.003305	29.16667	0.0000
D2001?	0.007791	0.002716	2.868487	0.0048
D_ACEH	-0.201556	0.074577	-2.702668	0.0078
D_BALI	-0.389366	0.015073	-25.83153	0.0000
D_SUMUT	0.566876	0.015698	36.11245	0.0000
D_SUMBAR	-0.333104	0.013624	-24.45064	0.0000
D_LAMPUNG	-0.497447	0.012057	-41.25784	0.0000
D_BENGKULU	-1.657687	0.025571	-64.82775	0.0000
D_JAKARTA	1.335100	0.013952	95.69142	0.0000
D_JABAR	1.207109	0.030749	39.25664	0.0000
D_JATIM	1.214788	0.029984	40.51469	0.0000
D_JATENG	0.905760	0.028334	31.96710	0.0000
D_YGY	-0.744754	0.015243	-48.85996	0.0000
D_RIAU	0.560355	0.014175	39.53231	0.0000
D_NTT	-1.280719	0.016305	-78.54539	0.0000
D_NTB	-0.944635	0.118359	-7.981067	0.0000
D_MALUKU	-1.872624	0.608615	-3.076861	0.0026
D_PAPUA	-0.309788	0.024871	-12.45556	0.0000
D_KALBAR	-0.426638	0.013472	-31.66733	0.0000
D_KALTIM	0.665089	0.021107	31.51090	0.0000
D_KALTENG	-0.880349	0.023358	-37.69010	0.0000
D_KALSEL	-0.531025	0.017128	-31.00340	0.0000
D_SULUT	-1.097556	0.037781	-29.05051	0.0000
D_SULTENG	-1.401781	0.023526	-59.58473	0.0000
D_SULTEG	-1.723408	0.025425	-67.78323	0.0000
D_JAMBI	-1.084051	0.021113	-51.34534	0.0000
D_SULSEL	-0.185698	0.012957	-14.33234	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.999992	Mean dependent var	47.54928
Adjusted R-squared	0.999990	S.D. dependent var	27.50798
S.E. of regression	0.088214	Sum squared resid	0.980487
F-statistic	519728.0	Durbin-Watson stat	1.717154
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.994691	Mean dependent var	15.93765
Adjusted R-squared	0.993470	S.D. dependent var	1.091638
S.E. of regression	0.088217	Sum squared resid	0.980555
Durbin-Watson stat	1.151101		

LAMPIRAN 2**Hasil Regresi dengan metode OLS**

Dependent Variable: LOG(Y?)

Method: Pooled Least Squares

Date: 02/17/06 Time: 21:59

Sample: 1998 2003

Included observations: 6

Balanced sample

Total panel observations 156

Convergence achieved after 25 iteration(s)

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.444829	0.017493	139.7616	0.0000
LOG(X1?)	0.811508	0.002227	364.3653	0.0000
LOG(X2?)	0.021359	0.000841	25.39841	0.0000
LOG(X3?)	0.109675	0.003183	34.45496	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.999960	Mean dependent var	74.88456
Adjusted R-squared	0.999959	S.D. dependent var	88.70486
S.E. of regression	0.568555	Sum squared resid	49.13481
F-statistic	1257599.	Durbin-Watson stat	0.579998
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.733937	Mean dependent var	15.93765
Adjusted R-squared	0.728685	S.D. dependent var	1.091638
S.E. of regression	0.568611	Sum squared resid	49.14438
Durbin-Watson stat	0.036080		

LAMPIRAN 3

Hasil Regresi dengan metode Random effect

Dependent Variable: LOG(Y?)
 Method: GLS (Variance Components)
 Date: 02/17/06 Time: 21:59
 Sample: 1998 2003
 Included observations: 6
 Balanced sample
 Total panel observations 156

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.333875	1.086655	3.068016	0.0026
LOG(X1?)	0.781161	0.076809	10.17019	0.0000
LOG(X2?)	0.012189	0.006150	1.981857	0.0493
LOG(X3?)	0.074133	0.017808	4.162919	0.0001
Random Effects				
_ACEH-C	0.252531			
_SUMUT-C	0.300524			
_SUMBAR-C	0.090429			
_RIAU-C	0.935451			
_JAMBI-C	-0.299327			
_SUMSEL-C	0.079108			
_BENGKULU-C	-0.589990			
_LAMPUNG-C	-0.417733			
_JAKARTA-C	1.329173			
_JABAR-C	0.192338			
_JATENG-C	-0.022584			
_YGY-C	-0.171196			
_JATIM-C	0.215737			
_BALI-C	0.108275			
_NTB-C	-0.514369			
_NTT-C	-0.867902			
_KALBAR-C	0.015065			
_KALTIM-C	1.417020			
_KALTENG-C	0.059628			
_KALSEL-C	0.045359			
_SULUT-C	-0.265882			
_SULTENG-C	-0.537274			
_SULSEL-C	-0.125470			
_SULTEG-C	-0.766351			
_MALUKU-C	-0.927776			
_PAPUA-C	0.465217			
GLS Transformed Regression				
R-squared	0.989984	Mean dependent var	15.93765	
Adjusted R-squared	0.989786	S.D. dependent var	1.091638	
S.E. of regression	0.110324	Sum squared resid	1.850052	
Durbin-Watson stat	0.834175			
Unweighted Statistics including Random Effects				
R-squared	0.993905	Mean dependent var	15.93765	
Adjusted R-squared	0.993784	S.D. dependent var	1.091638	
S.E. of regression	0.086064	Sum squared resid	1.125873	
Durbin-Watson stat	1.370729			

LAMPIRAN 4

	Y?	X1?	X2?	X3?
Mean	15313799	4523607.	2135.697	786195.5
Median	7540512.	2277524.	639.5500	357187.5
Maximum	67162699	22812659	33814.30	11162388
Minimum	1276998.	827675.0	0.400000	98674.00
Std. Dev.	18306650	6023290.	4900.182	1361517.
Skewness	1.635571	2.209966	4.508473	4.860115
Kurtosis	4.312180	6.297142	25.50407	31.77799
Jarque-Bera	80.74421	197.6451	3820.301	5997.260
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Observations	156	156	156	156
Cross sections	26	26	26	26

